



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
KOMISI VI DPR RI
RAPAT KERJA DENGAN MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI**

Tahun Sidang	: 2023-2024
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke-	: 10 (Sepuluh)
Jenis Rapat	: Raker
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 1 April 2024
Waktu	: Pukul 14.09 s.d. 16.25 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VI DPR RI Gedung Nusantara I Lt. 1 Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270
Ketua Rapat	: Mohamad Hekal, M.B.A (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/F-P. Gerindra)
Acara	: Pembahasan mengenai Progres Realisasi Investasi Tahun 2023
Sekretaris Rapat	: Dewi Resmini, S.E., M.Si. (Kabag Sekretariat Komisi VI DPR RI)
Hadir	: A. ANGGOTA DPR RI: 32 dari 55 orang Anggota, dengan rincian:

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN (F- PDIP)**

7 dari 12 orang Anggota

1. Adisatrya Suryo Sulisto
2. Prof. Assc. Dr. Darmadi Durianto, S.E.,
M.B.A.
3. ST. Ananta Wahana, S.H., M.H.
4. Ir. Deddy Yevry Hanteru Sitorus, M.A.
5. H. Mufti A.N. Anam
6. Ir. Harris Turino, M.Si., M.M.
7. I Nyoman Parta, S.H.

**2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
(F- PG)**

5 dari 8 orang Anggota

1. M. Sarmuji, S.E., M.Si.
2. Gde Sumarjaya Linggih, S.E., M.A.P
3. Doni Akbar, S.E., M.M.
4. Nusron Wahid
5. Drs. H. Dadang S. Muchtar

3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (F- P. GERINDRA)

5 dari 8 orang Anggota

1. Mohamad Hekal, M.B.A.
2. M. Husni, S.E., M.M.
3. Khilmi
4. Ir. H. La Tinro La Tunrung
5. Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M.

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F- P. NASDEM)

3 dari 6 orang Anggota

1. Martin Manurung, S.E., M.A.
2. Zuristyo Firmadata, S.E., M.M.
3. H. Subardi, S.H., M.H.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F- PKB)

3 dari 5 orang Anggota

1. Faisol Riza, S.S.
2. Siti Mukaromah, S.Ag., M.A.P.
3. Luluk Nurhamidah, M.Si., M.P.A.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F- PD)

3 dari 5 orang Anggota

1. Dr. Ir. Herman Khaeron, M.Si.
2. Hj. Melani Leimena Suharli
3. Dr. Edhie Baskoro Yudhoyono, B.Coom, M.Sc.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)

3 dari 4 orang Anggota

1. Amin AK, M.M.
2. Hj. Nevi Zuairina
3. Mahfudz Abdurrahman, S.Sos.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

3 dari 4 orang Anggota

1. Dr. H. Jon Erizal, S.E., MBA.
2. Eko Hendro Purnomo, S.Sos.
3. Hj. Intan Fauzi, S.H., LLM

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)

0 dari 2 orang Anggota

-

B. PEMERINTAH/UNDANGAN:

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (Bahliil Lahadalia, S.E.) beserta jajarannya

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Baik, bisa kami mulai ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI, dan Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Menteri Investasi/Kepala BKPM RI, Bapak Bahliil Lahadalia beserta jajarannya,

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah *Subhanahu wa ta ala*, Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM RI, pada hari ini dalam keadaan sehat wal afiat.

Bapak-Ibu hadirin yang kami muliakan,

Laporan dari Sekretariat Komisi VI, rapat kerja hari ini telah dihadiri oleh 22 orang, yang izin ada 3 dan sudah mewakili 8 fraksi, sehingga kuorum telah terpenuhi sebagaimana ditentukan Pasal 281 ayat (1) DPR tahun 2020 tentang Tata Tertib dan Pasal 276 ayat (1), maka perkenankan kami membuka rapat kerja pada hari ini dan rapat saya nyatakan terbuka untuk umum.

Setuju ya?

**(RAPAT: SETUJU)
(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.09 WIB)**

Baik, dan mengingat kita ada agenda lagi setelah raker ini, yang akan mulai jam 4, jadi saya minta persetujuan kita semua bahwa kita harus selesaikan rapat ini paling lambat jam 4, *gitu*.

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Baik, Bapak-Ibu yang kami muliakan,

Seperti kami *eh*, seperti kita ketahui, sektor investasi memiliki peranan yang sangat penting untuk perekonomian, baik sebagai *multiplier effect* untuk pembukaan lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Kementerian Investasi melaporkan bahwa realisasi investasi pada tahun 2023 mencapai 1.418,9 triliun atau 101,3 dari target investasi 2023. Sementara itu, target investasi untuk tahun 2024 ditetapkan sebesar 1.650 triliun atau naik 17,85% dibandingkan target 2023. Peningkatan target investasi tersebut seiring dengan agenda strategis nasional termasuk mega proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara serta program-program strategis lainnya.

Diharapkan di tahun 2024 ini, Kementerian Investasi dapat meningkatkan capaian kinerja serta target investasi di tengah situasi tahun politik dan persiapan pemerintahan baru di bawah ancaman resesi global serta kondisi geopolitik yang masih belum menentu. Secara khusus menjadi catatan bahwa Menteri Investasi/BKPM perlu mendatangkan investasi berkualitas, bermanfaat, menjaga perbandingan antara investasi dalam negeri maupun luar negeri, juga untuk pemerataan pendistribusian investasi, penyederhanaan proses perizinan, dan meningkatkan iklim investasi untuk investasi yang sehat dan kondusif.

Untuk itu, rapat kerja kita pada hari ini akan membahas realisasi tahun 2023 dan hal-hal lain yang dianggap penting untuk pencapaian target 2024. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Menteri Investasi untuk memberikan pemaparannya.

Silakan, Pak.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Terima kasih, Pimpinan.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Shalom, dan,
Salam sejahtera untuk kita semua,*

**Yang saya hormati Pimpinan dan seluruh Anggota DPR RI Komisi VI,
Teman-teman dari pejabat Kementerian Investasi yang saya hormati,**

Izin, Pimpinan, berangkat dari kesepakatan yang tadi telah Pimpinan ketok palu karena waktu kita tidak lama, maka izinkan saya untuk memaparkan juga secara singkat, tapi tidak akan merubah atau mengurangi substansi dari apa yang menjadi agenda rapat kita hari ini.

Yang pertama, izinkan saya untuk memberikan *highlight* sedikit tentang kinerja Kementerian Investasi dalam konteks realisasi investasi, perbandingan dari tahun 2015 sampai dengan 2023.

**Pimpinan yang saya hormati dan seluruh Bapak-Ibu Anggota Dewan
Komisi VI,**

Bahwa dari sejak 2015 sampai dengan 2023, itu ada itu ada 1 tahun di mana tahun 2018, Kementerian Investasi tidak mencapai target dalam realisasi investasinya, antara RPJM dan realisasi investasi, itu di 2018. Di mana RPJM kita adalah 765 triliun, tapi realisasinya 721 triliun. Namun sejak 2018 sampai dengan 2023, *alhamdulillah* realisasi kita selalu mencapai target, bahkan melebihi dari RPJM maupun dari target yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden. Contoh katakanlah kita lakukan di tahun 2023, RPJM kita itu 1.099,80 triliun, tapi Bapak Presiden Jokowi memberikan target 1.400 triliun. Dan *alhamdulillah* kita merealisasikan sebesar 1.418 triliun. Nah, capaian tersebut sudah barang tentu menjadi kerja sama kita semua, kerjasama yang apik dan baik antara kami dari Kementerian Investasi maupun dengan Bapak-Ibu yang ada pada Komisi VI, yang selalu *men-support* kami, baik dalam konteks memperjuangkan anggaran, program, dan sosialisasi.

Khusus untuk capaian tersebut, dari 1.418 triliun itu PMA-nya, tadi juga Bapak Pimpinan *me-announce* bahwa investasi yang berkualitas itu harus menjaga keseimbangan, antara PMA dan PMDN. PMA kita kurang lebih sekitar 743,9 triliun atau setara 52,4 triliun, *eh* 52,4% dan PMDN 674,9 triliun atau setara 47,6 triliun, *eh sorry* 47,6%.

Nah, perbandingan antara Jawa dan luar Jawa, tadi juga disampaikan, itu 51,5% di luar Jawa dan di Jawa 48,5%. Nah, secara keseluruhan investasi kita di sejak tahun 2019 sampai dengan 2023, ini adalah perbandingan antara Jawa dan luar Jawa, jadi sejak tahun 2020 kuartal ketiga sampai dengan 2023 akhir, *alhamdulillah* realisasi investasi kita di luar Pulau Jawa sudah lebih banyak ketimbang di Jawa dan ini sudah bagian daripada pemerataan pertumbuhan investasi.

Kemudian kami juga laporkan, bahwa tren realisasi investasi berdasarkan negara asal, Bapak-Ibu semua, Singapura masih nomor satu, Singapura masih nomor satu, di tahun 2023 itu mampu mencatat kurang lebih sekitar 15, 15,4 *billion US dolar*, sekalipun kita tahu bersama bahwa Singapura ini masih jadi *hub* dan sebagian pengusaha Indonesia juga ada di sana. Kemudian yang kedua, Tiongkok 7,4 miliar, Hongkong 6,5 miliar, kemudian Jepang, Malaysia, Amerika, dan Korea, itu adalah negara-negara yang masuk.

Bapak-Ibu semua,

Dalam rangka mendorong sektor hilirisasi, maka Kementerian Investasi lebih menitikberatkan pada bagaimana investasi itu didorong pada sektor hilirisasi. Dan itu dapat dilihat di 2023 itu kurang lebih sekitar, berapa? kurang lebih sekitar Rp200,3 triliun, ini untuk logam industri logam dasar, barang, dan mesin. Ini adalah untuk pabrik, yang dulunya kalau kita lihat pada tahun 2019 itu hanya Rp61,6 triliun di nomor 4, dan lompatannya memang ini cukup luar biasa seiring dengan proses perkembangan hilirisasi.

Saya juga ingin memaparkan, ada *slide* baru yang awalnya tidak pernah kami paparkan pada rapat-rapat tahun sebelumnya. Bahwa dalam

rangka memfokus untuk bagaimana investasi kita di sektor hilirisasi bisa berjalan, kami *breakdown*, bahwa di tahun 2023 realisasi investasi kita untuk sektor hilirisasi itu sebesar Rp375,4 triliun yang terdiri dari, mineral, nikel 136,6 triliun, bauksit 9,7 triliun, tembaga 70,5 triliun. Kemudian sektor pertanian CPO/Oleochemical itu 58, 50,8 triliun, sektor kehutanan 51,8 triliun, *petrochemical* itu adalah 46,3 triliun, dan ekosistem kendaraan listrik itu sebesar Rp9,7 triliun.

Kami juga melaporkan pada forum yang terhormat ini, bahwa investasi mangkrak, dari Rp708 triliun yang ada saat di awal, sekarang sudah mencapai sudah mencapai Rp558,7 triliun dan ini sudah *closed*, jadi tidak ada lagi perkembangan karena perusahaan-perusahaan yang lainnya sudah dianggap tidak lagi melanjutkan. Karena persoalan pertama adalah persoalan Covid dan kemudian adalah banyak perusahaan juga yang sudah melakukan diversifikasi pada sektor yang lain. Jadi kami melaporkan, di awal itu adalah 708 triliun, yang bisa terekseseksi adalah sebesar 558,7 triliun, di antaranya adalah pabrik-pabrik tersebut, contohnya adalah pabrik Lotte Chemical di Cilegon, ini yang dulu masuk mangkrak kurang lebih sekitar 5 tahun, sekarang pembangunannya sudah mencapai 80 sampai 85%, diresmikan tahun ini, direncanakan di bulan September, ini sudah selesai. Kemudian Masdar di Cirata, solar panel yang terbesar di Asia Tenggara, dan pabrik semen di Kalimantan, ini ada sebagai contoh-contoh saja dari apa yang kita lakukan dalam mengerjakan proyek investasi mangkrak 558 triliun tersebut.

Bapak-Ibu semua,

Kami juga laporkan bahwa untuk mengenai dengan perkembangan hilirisasi untuk *smelter* Freeport yang ada di Gresik, *alhamdulillah* kemarin kami mendampingi Bapak Presiden untuk menerima Freeport McMoran dan Freeport Indonesia, melaporkan bahwa bulan Mei-Juni itu *smelter* yang di Gresik yang dibangun dengan investasi kurang lebih sekitar 3 miliar US dolar itu sudah bisa berproduksi, sudah selesai. Jadi total konsentrat 3 juta itu, 1,7 juta di pabrik yang baru, kemudian 1,3 juta itu pabrik lama, ekspansi dari 800.000 ton menjadi 1,3. Jadi ke depan, *Insyah Allah* semua konsentrat yang dihasilkan dari Freeport sudah bisa *ter-cover* di dalam pabrik ini.

Kami juga melaporkan bahwa NIB yang hari ini sejak Undang-Undang Cipta Kerja diterbitkan, itu sudah mencapai 8.364.501 NIB, ini dari total yang kita lakukan. Kemudian, nah, ini yang saya mau sampaikan juga dalam kesempatan yang berbahagia ini, isu yang lagi hangat, yang dikeluarkan beberapa media nasional dalam beberapa hari terakhir.

Bapak-Ibu semua,

Saya mau melaporkan perkembangan kerja Satgas. Satgas kita ini ada dua yang kami Pimpin. Yang pertama itu adalah Satgas terkait dengan keputusan Keppres Nomor 11 Tahun 2021, ini adalah ketuanya namanya Satgas Percepatan Investasi, inilah ketuanya Menteri Investasi, wakilnya adalah Wakil Jaksa Agung, kemudian wakilnya lagi adalah Wakapolri. Ini tugasnya untuk bagaimana menyelesaikan investasi-investasi mangkrak dan

atau masalah-masalah di lapangan yang terjadi. Nah, yang kedua adalah Satgas Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Pendataan Penggunaan Lahan, yang terkait dalam hal ini adalah Menteri Kehutanan, ESDM, Pertanahan, Menteri Kementerian Investasi, pertanian, dan itu adalah ketuanya kami.

Nah kalau kita melihat di *slide*, *slide* nomor 17 coba, *slide* nomor 17.

WAKIL KETUA RAPAT (H.P. MARTIN Y. MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Mungkin bisa dilengkapi nih *slide* ini, bahannya, Pak.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Ini enggak ada di materi yang Bapak sampaikan ini.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Oh.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Jadi kalau boleh nanti *dilengkapin aja*.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Nanti kami akan lengkapi, karena ini kenapa saya sengaja angkat, supaya ada transparansi, ada transparansi, karena ini yang beberapa hari lalu menjadi konsumsi publik yang cukup luar biasa sekali.

Jadi pertama, pada 6 Januari, Bapak-Ibu semua, 6 Januari, menteri-menteri teknis ini menghadap Bapak Presiden untuk melaporkan bahwa ada beberapa aset negara atau kekayaan negara yang diberikan hak pengelolaannya kepada pihak swasta untuk diberikan izin untuk mengelola. Di antaranya adalah 2.078 IUP, pertambangan dari Kementerian SDM, kemudian yang kedua adalah 192, 192 izin penggunaan kawasan hutan, yang itu kurang lebih sekitar 3 juta hektar lebih, dan 344, 34.448 hak guna bangunan dan ini kurang lebih sekitar hampir 300 sampai 400.000 lahan. Dasar inilah kemudian dibuat satgas dan satgas itu kemudian untuk melakukan penataan di antaranya adalah pencabutan. Nah, dalam konteks itu, saya hanya membahas IUP. Jadi setelah dilakukan verifikasi oleh kementerian teknis, ini dibawa ke Satgas 2.078 IUP tersebut, satgas ini Satgas Nomor 1 Tahun 2022, lalu kemudian kita cabut, atas rekomendasi kementerian teknis, ini adalah mekanisme urutannya.

Yang kedua, setelah kita melakukan pencabutan, kita memberikan ruang kepada teman-teman yang merasa keberatan. Nah, syarat kenapa itu

dicabut sudah diumumkan juga jauh hari sebelumnya dan sudah berkali-kali, bahwa yang pertama adalah izinnya sudah ada, tidak diurus perkembangan izinnya. Yang kedua, izinnya ada, digadaikan di bank. Yang ketiga, izinnya ada, di-IPO-kan, uang IPO-nya tidak dipakai untuk mengelola investasi di mana lokasi itu berada. Syarat ketiga adalah izinnya ada *nominee* dan orangnya pailit, terkecuali adalah izinnya ada, kemudian RKAB 3 tahun tidak diurus, ini syarat-syarat yang dibuat. Terkecuali adalah RKAB-nya tidak dibuat karena izin IPPKH-nya belum dikeluarkan, karena memang sudah diurus, tapi IPPKH-nya *kan* biasanya agak sedikit lambat karena kuota lahan yang ada.

Dari dasar tersebut, saya izin menyampaikan, yang khususnya coba halaman 21, ini yang kemarin terbit di beberapa media, Bapak-Ibu semua. Ada dugaan yang disampaikan sebelumnya oleh salah satu media, bahwa ada yang mengatasnamakan saya, orang dalam atau orang dekat, bahkan ditengarai saya, meminta sesuatu dari penghidupan atau pengaktifan IUP nikel. Dan media tersebut sudah saya bawa ke Dewan Pers dan Dewan Pers sudah memberikan keputusan. Dewan Pers memerintahkan untuk meminta maaf kepada kami sebagai pengadu dan sekaligus melanggar Pasal 1 dan memberikan hak klarifikasi profesional. Jadi kemarin sudah saya lakukan dan dia sudah minta maaf. Ya kalau di bulan puasa orang sudah minta maaf, Allah *Subhanahu wa taala aja*, umatnya kalau sudah minta maaf harus memaafkan, apalagi seorang manusia kayak kita-kita ini, jadi kita memaafkanlah.

Namun, Bapak-Ibu semua, agar tidak ada dusta di antara kita, saya melaporkan ini ke Bareskrim. Dalam pandangan saya ini harus diungkap, supaya jangan main-main. Jadi yang ditengarai adalah ada 30, konon cerita dari cerita media nasional tersebut, 33 IUP nikel yang diaktifkan ini adalah memberikan upeti katanya, tapi saya enggak yakin, memberikan upeti kepada orang-orang saya, kalau orang-orang saya dalam urusan ini satgas, *gitu*. Jadi biar *aja* diproses. Jadi kita akan memanggil 33 orang ini supaya kita uji, ini data yang benar yang mana, karena kemarin saya sudah klarifikasi juga di media tersebut.

Saya pikir itu beberapa hal, dan proses sekarang hukumnya berjalan, karena ini juga menyangkut dengan nama baik saya juga dan institusi yang saya pimpin. Jadi harus saya membuka ini secara *fair*, agar tidak ada persepsi yang di luar, dugaan yang aneh-aneh.

Itu, Pimpinan, yang perlu kami laporkan menyangkut data terakhir. Mohon maaf, tadi saya memang punya inisial, apa, inisiatif untuk melakukan, karena ini di Bapak-Ibu Anggota Dewan yang terhormat yang mewakili rakyat, maka saya juga harus menyampaikan apa adanya dan saya siap mempertanggungjawabkan ini sampai kapan dan di mana pun.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Baik, terima kasih, Pak Menteri.

Kita langsung ke tanya jawab, tolong teman-teman waktunya sangat singkat, supaya kita bisa *ngejar* agenda berikutnya.

Yang pertama, Pak Amin, silakan.

F-PKS (AMIN AK, M.M.):

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

**Pimpinan, teman-teman Anggota Komisi VI yang saya hormati, yang dirahmati Allah,
Menteri Investasi/Kepala BKPM, Pak Bahlil yang selalu semangat,
Dan semua jajaran yang saya hormati,**

Karena waktunya singkat, ada beberapa pertanyaan, Pak, yang saya juga, coba ringkas, Pak. Tadi sudah disampaikan oleh Pimpinan tentang target investasi tahun 2024 ya, yang naik 17% dari tahun 2023, dan itu saya ingin ketegasan itu belum termasuk untuk, apa namanya, mega proyek IKN kalau enggak salah, Pak, ya, di situ ya, belum termasuk ya target investasi itu atau sudah termasuk ya? Mega proyek IKN *kan* anggarannya 466 triliun dan 20%-nya dianggarkan dari APBN. Nah, pertanyaan saya, Pak, ini dari berbagai berita yang simpang-siur di media itu *kan* kita sering mendengar, ini investor-investor kakap dari luar negeri, ini itu, sebagainya disebut, tapi ujung-ujungnya ternyata batal. Nah, pertanyaan saya, ini sebetulnya berapa *sih*, Pak, investor yang besar-besar itu yang benar-benar sudah komitmen ya, bukan hanya sekedar MoU-MoU yang kemudian dibatalkan. Karena sekali lagi, jangan sampai ini nanti APBN kita yang berdarah-darah, *gitu* ya. Anggarannya cuman 20%, *tapi* ternyata nanti jangan-jangan sampai *trabas* 50% atau malah mungkin sebagian besar akan dibiayai dari APBN, ini mohon, Pak, ini dibuka.

Juga kita baca di berbagai media, ada data yang simpang-siur antara menurut Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, itu dana APBN yang sekarang sudah, apa namanya, diserap atau digunakan untuk membangun IKN itu, berapa *sih* sampai saat ini? Itu, Pak.

Kemudian yang kedua, saya ringkas saja langsung *to the point*, sebetulnya kebijakan penataan investasi asing di Indonesia itu bagaimana, Pak? Kita satu sisi bangga *gitu* ya, sekarang sudah ada keseimbangan investasi Jawa, luar Jawa, bahkan trennya yang luar Jawa sudah meningkat sampai 52%. Dalam negeri, asing, itu juga proporsinya hampir samalah ya, di atas 50% asingnya. Di satu sisi bangga, tapi di sisi lain, bagaimana investasi asing ini benar-benar ya, benar-benar berdampak pada kesejahteraan rakyat Indonesia. Kita enggak ingin ada investasi asing, tapi semuanya juga dari asing teknologinya dari asing, *oke lah* kalau kita enggak mampu dari sisi teknologi. Tenaga kerja dari asing, *oke* kalau tenaga kerja asingnya kita memang tidak mampu. Tapi kalau semua buruhnya, tenaga kasarnya juga

dari asing, lalu apa dampaknya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia? Kita tidak ingin kasus-kasus seperti yang terjadi di Morowali itu terulang kembali.

Juga kaitannya dengan yang ketiga, Pak, penyerapan, apa, TKDN, khususnya, apa namanya, produk-produk UMKM kita, Pak, ya bagaimana ini bisa juga diserap? Ada investasi asing, *kan* memang juga tidak semua barang-barang yang tinggi, barang-barang yang sulit dijangkau sebagiannya mungkin bisa dipenuhi oleh UMKM kita dan juga tenaga-tenaga kita yang, apa namanya, kemampuan rendahlah, itu juga harus diserap karena angka pengangguran ini masih, tahun 2023, Pak, datanya itu ada 8 juta orang. Sekali lagi, kita ingin investasi ini benar-benar berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan juga peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia, *wabil-* khusus dalam urusan ini UMKM produsen.

Kemudian yang terakhir, Pak, yang terkait dengan IUP, yang Bapak sampaikan tadi, karena Bapak sudah sampaikan, bagus *gitu*, cuman kita tentu ingin kalau bisa kita dapat datanya, Pak, Komisi VI. Dari 2.051 yang dianggap tadi layak untuk dicabut, ya, itu mana *aja sih* PT-nya, perusahaannya apa saja *gitu*, pelanggarannya di mana saja begitu, kita layak untuk mendapatkan datanya itu.

Terima kasih, Pak Pimpinan, terima kasih, demikian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT :

Walaikumsalam,

Terima kasih.

Pak Herman.

F-PD (Dr. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

**Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VI yang saya hormati,
Saudara Menteri Investasi/Kepala Badan Penanaman Modal, dan
Seluruh jajaran yang saya hormati,**

Pertama, saya ingin mendalami dari besaran investasi. Besaran investasi yang tadi disampaikan, bahwa sejak tahun 2019, investasi selalu sesuai dengan target bahkan bisa melampaui prognosa yang kemudian ditargetkan oleh presiden. Presiden targetkan meskipun prognosanya masih di bawah 968 tapi ditargetkan 1.200 triliun, kemudian bisa melampaui menjadi 1.207 triliun. Kemudian juga ditargetkan prognosanya di tahun 2023, 1.099 triliun, ditargetkan oleh Presiden 1.400 triliun, kemudian terlampaui menjadi 1.418 triliun. Dan ini adalah besaran yang *fantastik* menurut saya dan ya

semestinya kalau melihat nilai investasi yang begitu besar, ini bisa untuk *mengkatrol* terhadap pertumbuhan ekonomi.

Nah, apakah dari seluruh target besaran investasi yang ada, ini terealisasi semua tidak, dalam tahun? Ataukah angka ini adalah angka realisasi? Apakah ini angka komitmen ataukah angka realisasi? Ini yang saya ingin tahu, ya. Dan kalau tidak salah, saya juga pada rapat jauh sebelumnya sudah meminta, kalau memang nilai investasi ini naik terus, saya meminta data. Datanya untuk mengetahui apakah data-data tersebut memang menunjang terhadap nilai yang disampaikan dalam pemaparan di awal ini, *gitu* ya. Jadi sampai hari ini saya tidak mendapatkan data itu. Jadi mohon nanti saya data-datanya, investasinya di mana saja, dan kalau tadi secara global disebutkan antara perbandingan PMA 52,4%, kemudian PMDN 47,6%, luar Jawa, dan Jawa, tentu selebihnya saya ingin tahu, bahwa apakah ini komitmen ataukah realisasi, mana datanya, untuk memperlihatkan bahwa angka ini tentu men-*trigger* terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dan pada akhirnya tentu harapannya dengan investasi yang sangat besar ini, tentu bisa menyejahterakan rakyat, kalau betul-betul angka ini *make sense* betul-betul terealisasi dan memang ada wujudnya yang kita bisa buktikan melalui data-data itu.

Yang kedua, yang saya ingin dalam ini adalah terhadap investasi yang mangkrak tadi, saya masih belum, belum paham ya, mangkrak itu disebabkan tadi *kan* hanya karena dampak Covid ya, dampak Covid, mangkrak itu karena dampak Covid, bukan?

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Izin kalau di, izin saya kasih ini,

F-PD (Dr. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Ya.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Jadi, sebelum kami masuk jadi Kepala BKPM, itu sudah ada investasi mangkrak 4-5 tahun, jadi itu akumulasi dari investasi mangkrak, sebelum Covid.

F-PD (Dr. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Ya.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Jadi saya masuk itu menyelesaikan cuci piring, itu 708 triliun.

F-PD (Dr. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Oke.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Gitu, Pak.

F-PD (Dr. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Saya kira ini juga mungkin nanti datanya bisa di.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Sudah ada, Pak, datanya tadi, di halaman berapa itu, ada itu.

F-PD (Dr. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Oh, yang di belakangnya, yang ini Lotte, segala macam ini?

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Iya.

F-PD (Dr. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Hyundai?

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Tapi tolong, izin lah istilahnya jangan “cuci piring”, karena itu kan pemerintahan berkelanjutan.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Nggak, maksudnya cuci piring dalam arti kata,

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Mungkin lebih baik dikatakan diselesaikan, Pak.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Iya, iya, PR yang harus diselesaikan.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Cuci piring *tuh* stigmanya negatif.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Tarik kata-kata saya, saya tarik kata-kata saya, saya selesaikanlah, terima kasih, Pak Deddy.

F-PD (Dr. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Cuci piring itu kalau menurut Pak Bahlil itu bahasanya sudah paling halus itu, udah paling, paling halus itu *udah*.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Eenggak, mohon maaf, Pak, ini mungkin bahasa Papua kali, mohon maaf.

F-PD (Dr. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Ya jadi, ya ini yang memang harus dijelaskan betul, karena *kan* kalau 4, 5 tahun lalu juga, ini pemerintahan Pak Jokowi *gitu* ya. Nah, oleh karena itu saya kira ini harus mendapatkan pendalaman.

Dan berikutnya sesuai dengan presentasi yang ada, meskipun saya belum mendapatkan paparannya, terkait dengan pembentukan satgas. Memang sejatinya bahwa ketika satgas diberikan kewenangan kepada Pak Bahlil sebagai ketua satgas ini juga dilaporkan dalam rapat-rapat di DPR, karena bagaimanapun seluruh persoalan negara ini *kan* bermitra dengan legislatif ya. Dan di situlah memang fungsi pengawasan kami untuk bisa mengetahui sejauh mana sebetulnya apa yang dilakukan oleh eksekutif, oleh pemerintah *gitu*, terkait dengan pembentukan satgas-satgas. Karena kalau kami tanya di beberapa kementerian yang perizinannya dipindahkan ya, dialihkan ke satgas, mereka merasa angkat tangan *gitu*, bahwa seluruh keputusan berada di Kementerian Investasi. Keputusan untuk bisa mencabut maupun mengeluarkan izin ataupun menghidupkan kembali itu sangat tergantung kepada Menteri Investasi *gitu*.

Nah, oleh karenanya memang agak terlambat sebetulnya, untuk kita mengetahui ini setelah menjadi persoalan di publik. Bagus juga hari ini Pak Bahlil mengklarifikasi terhadap berbagai isu publik yang berkembang, saya kira ini bagus, *gitu* ya. Namun demikian bahwa mari kita buktikan bahwa sesungguhnya kerja satgas ini ya juga memang *clear and clean, clear and clean*, bahwa semata-mata bahwa ini untuk mempercepat investasi. Bahkan satgas ini juga adalah juga dibangun untuk penataan, penataan terhadap penggunaan seluruh sumber daya alam yang ada di dalam negeri kita, *gitu*. Saya kira ini yang harus dijelaskan *gitu* ya, bahwa penataan itu segmentasinya apa? Apakah hanya tadi, kepada persoalan izin, ada izin, tetapi tidak dijalankan, tidak ada perkembangan? Kemudian ada izin, izinnya digadaikan di bank. Ada izin yang kemudian dia sudah beroperasi, IPO, IPO-nya tidak digunakan untuk kepada peruntukannya yang tentu ini secara hukum harusnya kepada objek yang bersangkutan.

Nah, kalau melihat terhadap 2.078 IUP yang diusulkan dicabut, kategori itu mana saja? Berapa besar kategori yang masuk di dalam izin yang

memang dia tidak dijalankan, misalkan? Berapa ribu yang memang izin itu digadaikan ke bank? Kemudian ada 2.051 IUP yang dicabut pada akhirnya, kemudian ada 585 IUP yang kemudian diterbitkan kembali, diterbitkan kembali ke kepada yang bersangkutan berarti, kepada yang bersangkutan. Kemudian ada 33 IUP nikel yang dipulihkan, dipulihkan karena mungkin memenuhi standar untuk hilirisasi, saya yakinnya ke sana *gitu* ya. Nah, *kan* masih tersisa banyak ini, nah, banyak izin lainnya, apa ini? perkembangannya di apa *kan* ini? Yang masih 2.000 sekian lebih ini, enggak, 1.000 sekian, 1.000, kurang lebih 1.500an izin. Ini *kan* masih ada sisa berarti dari jumlah angka-angka tadi. Nah, ini mohon nanti saya penjelasannya. Dan tentu ini juga untuk memperlihatkan bagaimana *clear and clean*-nya terhadap beberapa izin yang sekarang ditangani oleh satgas.

Kemudian terhadap Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan, ini juga mungkin apakah masih terkait dengan yang 2.078 IUP, atau ini berbeda *gitu* ya? Karena biasanya Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, kalau di luar kawasan nonhutan, itu menjadi kewenangan di Kementerian ATR/BPN, kalau di kawasan hutan menjadi domainnya dari Kementerian Kehutanan.

Satu hal yang, yang saya kira kemarin saya temukan, Pak Bahlil ya, saya menemukan bahwa memang perlu pengawasan yang lebih ketat dalam investasi, implementasinya perlu diawasi. Ada banyak, mungkin ya, kemarin saya membawa, dengan siapa ya, kemarin ada kepala bagian atau kepala apa ya, perencanaan ya, yang ikut saya kunker ke Cirebon itu. Bahwa memang investasi jangan sampai hanya kepada persoalan nilai, hanya pada persoalan kuantitatif. Tapi kualitasnya, kualitatifnya juga harus diwujudkan, *gitu*. Jangan sampai investasi masuk di kawasan *catchment area* misalkan, pada akhirnya yang tidak biasa banjir, Cirebon menjadi banjir. Investasi juga harus diawasi pada sisi-sisi penggunaan kawasan lingkungan hidupnya, pada penggunaan lahannya, sehingga betul-betul juga investasi bernilai, bisa meningkatkan terhadap taraf kehidupan masyarakat.

Ironislah kalau investasi hanya mengejar terhadap UMR, karena UMR di Tangerang sudah mahal, di Bekasi sudah mahal, di Karawang sudah mahal, diuber investasi masuknya Cirebon karena UMR-nya rendah. *Udah samain* sajalah di seluruh Indonesia itu UMR itu, biar sama *gitu*, supaya perspektif investasi bukan hanya untuk berbiaya murah, *tapi* Investasi betul-betul adalah atas kebutuhan sebuah produksi, *gitu*, sebuah produk, sehingga kemudian keuntungannya juga bisa dinikmati oleh masyarakat.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Bisa tolong dipercepat, Pak.

F-PD (Dr. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Ini terakhir memang, *gitu*, *kan ngabuburit* katanya.

Nah, ini yang menurut saya, saya usul, Pimpinan, bahwa atas berbagai persoalan investasi, untuk bisa membantu terhadap keefektifan investasi

terhadap kesejahteraan rakyat, maka menurut saya sangat penting kalau kita dalam sisa waktu yang tinggal berapa bulan ke depan, kita membentuk Panja Investasi, supaya tahu, apakah investasi ini betul bisa menggerak kesejahteraan, bisa menggerak pertumbuhan ekonomi atau hanya bersifat kuantitatif. Saya kira ini yang menurut saya penting, membantu Pak Bahlil, supaya Pak Bahlil juga sukses di dalam menyelesaikan sisa masa jabatannya. Kalau Pak Bahlil sukses, juga adalah kesuksesan bagi Komisi VI.

Saya kira itu. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Walaikumsalam,

Baik, Pak Harris, silakan.

F-PDIP (Dr. Ir. HARRIS TURINO, S.H., M.Si., M.M.):

Baik, terima kasih, Pimpinan.

**Yang terhormat Pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi VI,
Yang terhormat Menteri Investasi/Kepala BKPM beserta seluruh jajarannya,**

Saya mengapresiasi, Pak Bahlil, bahwa pada hari ini, Pak Bahlil, tadi mengatakan ingin terbuka dan transparan. Saya akan berangkat dari pemberitaan majalah Tempo, tanggal 4 sampai 10 Maret, Pak Bahlil, judulnya adalah "Main Upeti Izin Tambang" yang kemudian ada juga *podcast* Bocor Alus Politik ya, yang semuanya membawa *tone* yang sangat negatif kepada Menteri Investasi. Dan saya sebagai anggota Komisi VI, yang sekaligus Mitra Kementerian Investasi, maka saya akan menggunakan kesempatan ini untuk memberikan kesempatan kepada Pak Bahlil untuk lebih transparan lagi, karena kalau apa yang diberitakan oleh Tempo benar, maka kami di Komisi VI juga ikut salah, karena Komisi VI adalah mitra dari Kementerian Investasi.

Tadi Pak Bahlil mengatakan, sudah melaporkan majalah Tempo ke Dewan Pers ya. Dan Pak Bahlil sudah menggunakan hak jawab setelah laporan itu. Yang menarik adalah, Pak Bahlil, masih banyak hal yang rasanya perlu diungkapkan secara terbuka, terkait dengan, yang pertama adalah munculnya Keppres yang pertama, Keppres 11 Tahun 2021, yang menunjuk Pak Bahlil sebagai Ketua Satgas Investasi yang kemudian memetakan dan melaporkan kepada presiden. Kemudian muncul Keppres 1 Tahun 2022, yang pada akhirnya dengan Keppres ini maka dibentuk Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi pada 20 Januari 2022. Dan Satgas kemudian seperti yang Bapak paparkan adalah mencabut, mengusulkan untuk dicabut 2.078 IUP dan 2.051-nya dicabut, 585 pembatalan, dan 31 diterbitkan kembali. Ini data yang Bapak paparkan. Dasar

pencabutannya, tadi Bapak sudah katakan, yaitu sudah dapat IUP, tetapi tidak digunakan dan tiga hal yang lain ya.

Tetapi kita tahu, Pak Bahlil, majalah Tempo juga jelas mengungkapkan, Pak, PT Meta Mineral Pradana yang punya dua IUP di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, masing-masing 40, 470 hektar dan 165 hektar, ini yang kemudian ditengarai juga tidak ada aktivitas sama sekali di dua IUP ini. Citra satelit yang berhasil didapatkan oleh *Greenpeace* mengkonfirmasi mengenai hal ini. Dan majalah Tempo kemudian melakukan penelusuran, pemegang sahamnya adalah Riva Capital sebesar 10% dan Bersama Papua Unggul sebesar 90%, yang kemudian menurut majalah Tempo, kedua perusahaan ini adalah milik Bapak Bahlil Lahadalia. Jadi rasanya ada ketidakadilan di sini, kenapa tidak dicabut?

Yang kedua, Pak Bahlil, khusus mengenai 31 yang sudah diterbitkan kembali di Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Sulawesi Tengah. Jelas *podcast* Bocor Alus juga mengatakan, bahwa penerbitan kembali ini banyak bau-bau yang tidak sedap, yang tadi Pak Bahlil sudah ungkap, yaitu adanya permintaan anggaran yang jumlahnya miliaran rupiah dan termasuk juga permintaan saham untuk satgas. Rasanya, Pak Bahlil, ini kesempatan di Sidang Dewan yang terhormat ini, Pak Bahlil, bisa mengkonfirmasi sejauh mana kebenaran dari kedua berita tersebut. Karena jangan sampai beritanya menjadi semakin liar dan akibatnya kami yang di Komisi VI ikut disalahkan, karena rakyat bertanya, sejauh mana pengawasan yang sudah dilakukan oleh Komisi VI. Maka dari itu, Pimpinan, saya mengusulkan untuk dibentuk Panja Investasi agar semua masalah ini menjadi terang.

Kemudian mengenai hilirisasi, terutama hilirisasi nikel, mungkin bisa dipaparkan, Pak Bahlil, siapa sebenarnya pihak-pihak yang paling menikmati dari hilirisasi ini? Apakah benar Pemerintah Indonesia, atau investor asing? Berapa banyak kontribusi pajak dividen, atau apa pun juga yang diterima oleh Pemerintah Indonesia? Berapa banyak pekerjaan, lapangan kerja yang diciptakan untuk warga Indonesia, dari proses hilirisasi ini? Kita tahu di dalam debat capres maupun cawapres, banyak sekali pertanyaan, apa pun pertanyaannya, jawabannya hilirisasi, ini jadi menarik.

Terakhir mengenai IKN, mohon juga dikonfirmasi, seberapa banyak investasi asing yang sudah masuk ke IKN? Siapa saja? Berapa besarnya? Apa bentuknya? Rasanya juga perlu ada keterbukaan, ini semua dibuka, sehingga sepakat yang dikatakan Pak Amin, jangan nanti pada akhirnya semuanya dibebankan kepada APBN. APBN kita tidak akan kuat untuk menanggung keseluruhan, harus ada pelibatan dari swasta.

Jadi, Pak Bahlil, rasanya kami di Komisi VI, supaya mendapatkan gambaran yang lebih jernih tentang semua ini, bukan hanya berita mengenai bahwa investasi selalu mencapai target sebesar 1.400 kali ini, tetapi banyak hal-hal detail yang ada di bawah karpet, yang rasanya perlu dibuka, agar baik Kementerian Investasi maupun kami yang menjadi mitranya di Komisi VI, bisa sama-sama mengawal kasus ini. Terima kasih.

Assalamualalaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,

Baik, Pak Darmadi.

F-PDIP (Prof. Assc. Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A.):

Terima kasih, Pimpinan.

Yang saya hormati Pak Kementerian Investasi, Pak Bahlil, dan jajarannya,

Jadi kita apresiasi, pertama, atas pencapaian realisasi, saya sebut realisasi karena di sini sudah ditulis capaian, ya, di tengah-tengah berbagai tekanan yang mungkin agak mencoreng nama Kementerian Investasi. Tempo menulis ada “bau amis”, ada “uang semir”, itu kan istilah yang kasar, Pak, sangat kasar ya. Yang kalau bau amis setahu saya, Pak Bahlil, ini baunya wangi, parfumnya lain ya, dari Paris atau Papua, tadi saya salaman parfumnya masih, ya bagus, kalau zaman 70-an 80-an parfumnya lain, sekarang sudah beda, *necis*, jadi *crazy rich from Papua* ya. Nah, apresiasi ini bagus, kita apresiasi, ya.

Jadi, yang kedua adalah kurang lengkap sebetulnya paparannya, yang saya butuhkan sebetulnya waktu kita buat Undang-Undang Cipta Kerja itu *kan* kita berharap penyerapan tenaga kerja, Pak. Nah, tadi saya enggak melihat di sini ada penyerapan tenaga kerja. Kalau 2017 ke 2022 itu tidak terlalu memuaskan, kenapa? karena pertambahannya enggak banyak *gitu*. Nah, kita butuh sebetulnya di 2023 ini seperti apa *kan*? Kami punya catatan, waktu 2017 investasinya hanya 600 triliun lebih, tenaga kerjanya 1.176.000, 2022 itu 1.207 triliun, tenaga kerjanya hanya 1,3 juta, berarti kan pertambahannya tidak signifikan ya, di tengah pertambahan investasi yang luar biasa besar, jadi ini menjadi catatan kami. Nah, kami minta paparannya lebih lengkap mengenai realisasi di 2023. Nah, ini justru poin penting, ini poin penting yang tidak dipaparkan hari ini. Supaya rakyat juga tahu bahwa penyerapan tenaga kerja bagus.

Yang ketiga adalah masalah yang sering dikeluhkan oleh banyak menteri.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Izin, Pak, mohon maaf, di halaman pertama.

F-PDIP (Prof. Assc. Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A.):

Oh sudah ada?

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Tentang lapangan pekerjaan, Pak, mohon maaf, Pak, di *slide* nomor 4. Mohon maaf, saya, *makasih*.

F-PDIP (Prof. Assc. Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A.):

Oh, berapa angkanya, berapa sekarang?

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Satu juta, 1.823.543, Pak.

F-PDIP (Prof. Assc. Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A.):

Sudah bagus *kan*, lumayan ya?

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Dari, dari ini saya karena binaan Prof. juga soalnya.

F-PDIP (Prof. Assc. Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A.):

1,3 1,8 ya kita apresiasi *kan* capaian penyerapan tenaga kerjanya.

Yang ketiga adalah yang sering dikeluhkan oleh disebut oleh Menko Perekonomian, Bapak Erlangga Hartarto, bahwa Kementerian Investasi juga mestinya bisa memperbaiki *i-core* ya, *i-core* kita *kan* kurang bagus, Pak, nah capainya bagaimana ya sejauh ini, apakah ada peningkatan luar biasa atau mungkin ini belum ada di sini ya *i-core*, belum ada? *Oke*, nanti ini mungkin bisa ditambahkan.

Yang keempat, ada catatan saya mengenai negara asal, berdasarkan negara asal. Saya melihat Singapura ini *number one* terus, Pak, seolah-olah Kementerian Investasi ini tidak punya kreativitas untuk menarik lebih jauh dari negara lain. Saya lihat Tiongkok ini turun, Pak, Tiongkok ini turun 0,8 padahal itu potensi ya *kan*, mengandalkan Singapura yang enggak jelas juga menurut saya, apakah betul orang Singapura yang investasi? Jangan-jangan orang Papua, Pak, di sana yang investasi di sini, ya *kan*? Jadi bisa saja, Pak Menteri. Jadi dari tahun 2020 sampai 2023 itu Singapura terus dan naiknya 2 miliar dolar US ini, dari, dari tahun lalu. Enggak tahu, ini enggak ada kreativitas dari tim ini di sini, untuk bisa lebih terdiversifikasi, bahkan Tiongkok saja turun di 2023, ini ada apa, Pak, Pak Menteri, ya? Kalau Singapura lebih banyak *kan* kita tahulah orang mana investasi itu, Pak, ya orangnya itu-itu *aja*, Pak, *gitu*. Nah, ini mohon penjelasan, apa kreativitas Bapak untuk menggaet lebih banyak misalnya dari negara lain? Dari Hongkong, Jepang, Tiongkok, begitu ya. Nah, ini apa artinya kalau Singapura ini naik terus, selalu *ranking* pertama terus, jadi itu ketiga.

Keempat ada soal “bau amis” dan “uang semir” ini adalah mungkin banyak yang enggak jelas soal, soal alur kerja satgas, Pak. Alur kerja satgas ini harus dijelaskan lebih jelas *gitu* ya, apalagi fase klarifikasi itu, Pak, ah itu sumber itu, Pak, waktu klarifikasi itu itu. Makanya disebutkan Pak Harris, ada 2 sampai 25 miliar, persen, 30% saham, mungkin muncul di sana, Pak. Nah, bagaimana Bapak menutup celah-celah? Saya tidak menuduh siapa-siapa, tapi di situ mungkin akan timbul celah saat klarifikasi, “tolong *dong* nanti kasih saya 2 miliar atau 5 miliar atau 25 miliar” *gitu*. Fase di sanalah maka banyak ada *loop hole*, ada lubang yang harus Bapak tutup, sebetulnya. Nah, ini ceritanya bagaimana cara Bapak me-*minimize* risiko yang timbul ya, apalagi kalau perdebatan Bapak punya kuasa penuh *kan*, untuk mencabut dan memberikan izin kembali ya, padahal Bapak *ngomong* ada kewenangan ESDM, tapi ESDM membantah *kan*, “Bahwa tidak ada kewenangan di kami”.

Saya bacakan berita, “Sebelumnya Menteri ESDM, Arifin Tasrif, menjelaskan pengaktifan kembali IUP ditetapkan oleh Satgas Investasi yang dipimpin oleh Bahlil tanpa membutuhkan persetujuan atau rekomendasi dari Kementerian ESDM”.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Mohon maaf, Pak, berita tanggal berapa, Pak?

F-PDIP (Prof. Assc. Dr. DARMADI DURianto, S.E., M.B.A.):

Ini *Bloomberg*, Pak.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Gimana?

F-PDIP (Prof. Assc. Dr. DARMADI DURianto, S.E., M.B.A.):

Di *Bloomberg*, berita dari *Bloomberg* tanggal,

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Coba.

F-PDIP (Prof. Assc. Dr. DARMADI DURianto, S.E., M.B.A.):

Nanti saya kirim, Pak.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Pak, mohon maaf, biar tidak bias, izin, Prof.

F-PDIP (Prof. Assc. Dr. DARMADI DURianto, S.E., M.B.A.):

Iya.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Coba cek risalah rapat Pak Arifin dengan Komisi VII.

F-PDIP (Prof. Assc. Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A.):

Ya, berarti ini salah di sini beritanya.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Artinya karena ini rapatnya terbuka.

F-PDIP (Prof. Assc. Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A.):

Ya.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Saya mohon untuk informasinya juga yang harus *clear and clean*.

F-PDIP (Prof. Assc. Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A.):

Ya nanti Bapak jelaskan, Pak.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Iya.

F-PDIP (Prof. Assc. Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A.):

Ya nanti Bapak jelaskan, Pak, Bapak jelaskan, supaya, ini *kan* dalam ruang sidang yang terhormat, *nih*. Jadi ada fase di mana ada tahap memang Bapak klarifikasi, begitu *kan*.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Baik.

F-PDIP (Prof. Assc. Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A.):

Prof Bahlil.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Siap Prof, Tempo jilid 2 kalau begitu, Prof., *makasih*.

F-PDIP (Prof. Assc. Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A.):

Ya, saya berdoa supaya tahun depan menjadi Profesor Bahlil, Menteri ESDM. Nah, beberapa catatan kembali adalah soal,

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Masih, masih banyak, Pak, ya catatannya?

F-PDIP (Prof. Assc. Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A.):

Ya, sedikit lagi, Pak.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Oke.

F-PDIP (Prof. Assc. Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A.):

Sedikit lagi, Pak.

Soal tempo ini, Pak, memang Bapak harus klarifikasi betul yang dikatakan teman saya, Pak Harris, soal PT Papua Bersama ya *kan*, itu banyak Bersamanya, Pak, PT-nya Bapak, Pak. PT Papua Bersama, Papua Menang, Papua Unggul, ya *kan*, jadi hal-hal kayak *gini* memang harus diklarifikasi, apalagi yang soal PT Meta yang dipunyai oleh PT Papua, PT Kaci Purnama Indah, di mana ada orang Bapak namanya Setyo Mardanus, itu Bapak harus jelaskan, Pak, itu konon katanya itu *kan* orangnya Bapak gitu, apakah betul itu Setyo Mardanus itu ya? Nah, enggak Setyo lagi. Jadi itu, artinya apa? Artinya jangan sampai Kementerian Investasi menjadi 'bau amis', "uang semir", "kabut hitam investasi Indonesia" ini yang harus kita perjelas.

Saya pikir itu poin-poin penting dari saya, mohon diklarifikasi supaya kita bisa tahu semuanya.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Baik, terima kasih.

Pak Subardi. Dan tolong diingat sesi tanya jawab kita paling lama setengah jam-an lagi, karena habis itu kita harus akhiri rapatnya.

F-P. NASDEM (H. SUBARDI, S.H., M.H.):

Siap, Pimpinan.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Silakan, Pak Subardi.

F-P. NASDEM (H. SUBARDI, S.H., M.H.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera untuk kita semuanya,

**Yang saya hormati Pimpinan Komisi VI, dan
Segenap jajaran Anggota DPR RI Komisi VI,
Dan tentunya yang saya hormati, Pak Bahlil, selaku Menteri Investasi
dan BKPM, dengan seluruh jajarannya,**

Karena waktunya pendek, saya cukup mungkin dua poin *aja*. Yang pertama, yang tentunya juga saya apresiasi bahwa realisasi investasi di bidang hilirisasi tahun 2023 dari sisi angka, cukup menjanjikan ya, dari sisi angka ya. Namun demikian saya ingin mencermati dari apa yang telah dipaparkan ini dari beberapa, apa, bidang hilirisasi antara mineral, pertanian, kehutanan, minyak, dan gas, kemudian ekosistem kendaraan listrik ya. Yang kami perhatikan semuanya ini adalah dulunya adalah merupakan kekayaan negara kita dari alam ya, mineral itu dari alam kita, kemudian pertanian juga bumi kita, hutan juga dari alam kita, minyak gas demikian juga, ekosistem kendaraan listrik juga sama lah. Nah, tentunya di sini harus merupakan ada satu upaya, tidak hanya pada hilirisasi yang dipikirkan, tapi ada konsepsi ataupun penataan di dalam produksi, sehingga betul-betul dalam hulu, pengelolaan hulu, itu betul-betul akan mencerminkan amanah dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar '45 kita. Tidak hanya untuk menjadikan lapangan kerja *tok, tapi* semata-mata hakikatnya adalah untuk kemakmuran rakyat semesta ya, di mana Pasal 33 Undang-Undang Dasar kita.

Nah, oleh karena itu, bagaimana dalam hal ini Kementerian Investasi untuk melakukan upaya ya, penataan ataupun mengelola daripada di bidang hulu, dari sisi, tadi sudah sampaikan oleh Pak Bahlil, untuk tertib perizinannya ya, kemudian tata kelolanya kemudian *mapping*-nya dan sebagainya, saya tidak paham persis detailnya mungkin, Pak, Pak, Pak Bahlil atau Kementerian Investasi lebih paham.

Dan bagaimana tidak terjadi masuknya atau campur tangannya “tangan-tangan jahil”, mungkin pahamlah dengan tangan-tangan jahil dalam, dalam konsep apa pengelolaan sumber daya alam, tangan jahil. Yang ada adalah tangan-tangan Bahlil ya, *kan* beda tangan jahil adalah orang luar, tangan Bahlil *kan* di dalam, dan upaya untuk memperbaiki ini sejauh mana? Mungkin dari hulu itu seperti apa? Sehingga dihilirisasi, di hilir itu sudah tertata dengan baik, rakyat sudah memanfaatkan, rakyat sudah menikmati, di hilir apalagi, rakyat akan bisa menikmati lagi. Tetapi ketika di hulu itu tidak dilakukan sebuah upaya penataan yang bagus sehingga apa yang terjadi

adalah tangan-tangan jahil tadi, sehingga tangan-tangan Bahlil tidak tersentuh, itulah kira-kira.

Nah, kemudian kaitannya hilirisasi, mungkin saya mencermati bagaimana pembangunan *smelter-smelter* itu jangan keduluan daripada investor-investor yang, yang nantinya ketika negara kita, pemerintah, membikin *smelter*, sudah keduluan, sehingga *mubadzir* ataupun kurang menguntungkan. Ini mohon ada satu upaya yang tepat dan sejauh mana perencanaan secara matang daripada *men-support* pembangunan hilirisasi ini.

Yang kedua soal ini, program ini NIB, cukup luar biasa, yang dilaporkan pada saat ini, sudah terbit NIB 12.288.243 atau 12 juta. Nah, sederhana yang ingin saya tanyakan, dengan 12 juta NIB itu *by data*, datanya ada? Nah, sejauh mana setelah data masuk dalam kementerian, ke dalam Kementerian Investasi, mau diapakan langkah-langkahnya? *Kan* di situ sudah ter apa, ter, ada kluster-kluster, nah, klaster pangan, klaster ini, klaster ini, dan sebagainya. Sejauh mana mau diupayakan agar mereka betul-betul bisa meningkat, bisa mampu bersaing, tidak hanya sekedar mencatat, tidak hanya sekedar mendata ya, karena dalam mendata pun pembiayaan negara sudah cukup banyak, 200-an miliar, tapi bagaimana mengupayakan mereka itu punya daya saing, punya daya produksi, punya potensi kerja, dan bisa, bisa meningkatkan pendapatan mereka, menumbuhkan ekonomi mereka. Rata-rata NIB yang banyak adalah UMKM, rata-rata. Orang jualan tempe harus bikin NIB, orang jualan gorengan ya itu juga harus NIB. Mereka juga sama dengan yang memiliki pabrik, dia butuh makan, butuh ini, dan bisa hidup. Nah, sejauh mana langkah-langkah kementerian Investasi di dalam rangka mendorong mereka untuk tumbuh dan berkembang.

Itu *aja*, terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT :

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,

Baik, Pak Hendrik.

F-P. GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., LL.M.):

**Pimpinan dan Ibu-Bapak Anggota Komisi VI yang saya hormati,
Pak Menteri Investasi/Kepala BKPM, Pak Bahlil, dan jajarannya yang
sangat saya hormati,**

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Shalom,
Salam sejahtera untuk kita semua.*

Yang pertama, saya mau menegaskan bahwa saya akan *stick* hanya kepada agenda rapat di sore hari ini, karena agenda ini adalah terkait dengan progres realisasi investasi tahun 2023, maka saya tidak akan ke mana-mana.

Menjadi ironis dan paradoks juga bagi saya, kalau saya punya ekspektasi kepada pihak lain untuk disiplin, tetapi saya sendiri tidak disiplin, saya mau disiplin terkait dengan agenda rapat kita di hari ini, Pak Bahlil.

Dalam kaitan itu, saya mau mengacu kepada realisasi investasi tahun 2023 yang telah melampaui target. Jujur saja, Pak Menteri, ketika target itu diampaikan dalam forum rapat di Komisi VI sini, saya termasuk salah satu anggota Komisi VI yang skeptis terhadap target yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi tersebut kepada Bapak. Mengapa saya skeptis atau pesimis? Karena saya realistis terhadap kondisi ekonomi global, regional, dan nasional pada saat itu. Tetapi dari data yang Bapak sajikan ini membuktikan bahwa target itu terealisasi bahkan melampaui target, saya kira ini apresiasi saya yang luar biasa kepada Pak Menteri dan jajarannya. Sebab sesuatu yang tidak mungkin itu dirubah menjadi sesuatu yang mungkin, ini hanya orang-orang yang luar biasa saja *nih*, Pak Menteri.

Yang kedua sebagai wakil Maluku, saya juga bergembira dengan sebaran investasi di luar Jawa, meskipun Maluku daerah yang saya wakili itu hanya sebagian kecil dari daerah luar Jawa yang Bapak maksudkan, tetapi paling kurang dari presentasi sebaran investasi ini, ini sesuatu yang menggembirakan bagi kami, karena bertahun-tahun lamanya investasi itu terlalu Jawasentris dan di rezim Pak Jokowi 10 tahun terakhir khususnya di Pak, ketika Pak Bahlil menjadi menteri, sebaran investasi itu rasionya berubah, lebih banyak di luar Jawa dibandingkan di Pulau Jawa. Termasuk juga tentu *direct foreign investment* atau PMA 52,4% dan lebih besar dari penanaman modal dalam negeri yang 47,6%. Saya kira ini juga capaian yang positif dan, dan patut untuk, patut untuk diapresiasi.

Nah, saya juga mencatat, Pak Bahlil, saya ini *kan* sering bertemu dengan masyarakat terutama UMKM karena itu mitra kerja kami di Komisi VI. Yang saya temukan di dapil saya, betapa bersukacitanya pelaku-pelaku UMKM yang dengan mudah saat ini, ya manfaat dari Undang-Undang Cipta kerja terkait dengan *online single submission* yang kemudian menerbitkan atau memproduksi Nomor Induk Berusaha dalam waktu yang sangat cepat, ini sesuatu yang jangan kita lihat ini kecil bagi Bapak-Ibu sekalian, ini sesuatu yang besar dari perspektif pelaku usaha UMKM. Karena dulu kala kalau mereka mau mengurus NIB, susahnya minta ampun, mereka berhubungan dengan birokrasi lokal yang sangat-sangat tidak jelas, kapan urusan administrasi itu selesai. Tapi sejak berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja yang memang oleh Putusan MK nomor 91 tahun 2020 sempat dinyatakan inkonstitusional bersyarat, tapi pemerintah Jokowi dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 yang kemudian dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 telah menjadi undang-undang. Nah, luar biasa OSS dan NIB ini sekarang jumlahnya luar biasa besar itu, Pak, Pak Menteri. Dan itu sesuatu capaian yang menurut saya adalah sesuatu yang harus diapresiasi, 12.288.243 NIB, ini sesuatu capaian yang menurut saya ini sekali lagi, saya

harus memberi apresiasi kepada jajaran Kementerian Investasi dan kantor BKPM

Yang berikutnya, Pak Menteri, saya sebagai wakil dari daerah yang banyak pulau dan luas, lautannya sangat luas, terus terang saja berkali-kali saya sering kali dibebani dengan pertanyaan kapan hilirisasi sektor perikanan itu dilakukan. Kalau di pemerintahan Presiden Jokowi kita memberi apresiasi, karena pemerintah berani untuk melakukan hilirisasi sektor pertambangan. Kami berharap hilirisasi sektor perkembangan, pertambangan ini juga, kebijakan hilirisasi ini juga mengekspansi sektor yang lain, dalam konteks saya, kalau bisa itu sektor perikanan, Pak, sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh negara secara umum dan terutama untuk daerah yang memiliki potensi perikanan yang besar, seperti Maluku.

Yang terakhir, Pak Menteri, saya percaya betul bahwa kita memang butuh investasi dan saya percaya betul Bapak dan jajarannya menggenjot investasi secara luar biasa. Tetapi saya tidak pernah berubah dari prinsip saya sejak awal saya menjadi Anggota Komisi VI, investasi ideal yang saya maksudkan adalah investasi yang etis dan responsif. Etis artinya kita tetap berharap serapan tenaga kerja harus sebanyak-banyaknya tenaga kerja domestik atau Tenaga Kerja Indonesia atau tenaga kerja lokal, dan responsif itu responsif terhadap penataan atau *compliance* terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan lingkungan. Karena kalau kita kembali lagi soal dikotomi antara antroposentris dan ekosentris, saya termasuk salah satu orang yang memilih jalan tengah, artinya manusia bukan segala-galanya atas investasi, lingkungan juga bukan segala-galanya untuk investasi, tapi mesti ada pendekatan-pendekatan tengah-tengah yang harus diambil dalam kebijakan investasi Bapak.

Yang terakhir sekali sebagai Anggota Fraksi Partai Gerindra, saya melihat belum ada relevansi dan urgensi untuk Komisi VI membentuk panja terkait dengan investasi itu, terima kasih dari saya.

Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Walaikumsalam,

Terima kasih.

Pak Abdul Hakim Bafagih.

F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh,

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi VI,

Yang saya hormati, Pak Bahlil, beserta seluruh jajaran Menteri Kementerian Investasi dan juga BKPM,

Yang pertama, saya akan membahas dari realisasi investasi, jadi memang kami mengapresiasi secara nilai capaian daripada Kementerian yang Bapak pimpin, tembus daripada target renstra dan juga target yang ditetapkan sama Pak Jokowi. Kemudian secara sebaran juga tidak Jawa *oriented*, sudah banyak di luar pulau Jawa, dan kemudian yang ketiga, permasalahan-permasalahan yang tadi mungkin ada salah-salah istilah itu, 78,9%-nya sudah dapat terselesaikan di zaman kepemimpinan Bapak.

Nah, dari realisasi ini ada tiga hal yang ingin kami tanyakan, yang pertama, Pak Bahlil, sebaran Jawa dan luar Jawa, lebih banyak di luar Jawa, nah, itu nanti mungkin bisa dipaparkan luar Jawanya di mana saja, Pak? Yang kami khawatir itu nanti terkonsentrasi di satu dua pulau saja, tetapi ada beberapa pulau-pulau, mungkin dari pulaunya Pak Hendrik tadi itu, tidak mendapatkan sebaran investasi yang cukup atau bahkan hanya timpang di satu pulau saja, itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, memang saya pernah menyampaikan juga kepada Bapak dan saya sependapat dengan Prof Darmadi tadi itu, kenapa dari luar itu terkonsentrasi di Singapura saja, Pak, dari 2019? Penyumbang terbesar investasi asing dari Singapura. Memang betul Singapura di sini menjadi *hub*, istilahnya apa ya, *hub* informasi dan juga *hub*-nya di Asean atau bahkan di Asia untuk investasi di, di daerah-daerah sini, Pak, ya, tapi apa enggak ada potensi-potensi daripada negara lain yang bisa setidaknya mendekati daripada Singapura itu, itu yang kedua.

Kemudian yang ketiga, objektif daripada capaian realisasi investasi ini tentunya pertumbuhan ekonomi dan juga mengentaskan kemiskinan. Nah, beberapa kali paparan yang disampaikan dari Kementerian Investasi ini, jadi dari realisasi yang sudah dicapai, kemudian dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga pengentasan kemiskinan, seberapa besar, itu kami belum pernah mendapatkan data yang seperti itu, Pak Bahlil. Nanti mungkin ke depannya ketika memaparkan, apalagi saya tadi membuka di Google itu, target angka kemiskinan di tahun 2024 ini *kan* di angka 7,5%, nah, mudah-mudah dengan target apa, dengan capaian investasi ini bisa menekan sampai dengan bahkan lebih bisa di bawah 7,5%, Pak Bahlil, itu berkaitan dengan realisasi investasi.

Selanjutnya berkaitan dengan satgas yang memang seliweran di Instagram, Pak. Kebetulan saya pakainya hanya Instagram saja dan banyak teman-teman juga yang pada tanya-tanya kepada saya. Tetapi ketika tadi Pak Bahlil menyampaikan kriteria-kriteria yang dipaparkan khususnya di satgas, apa tadi namanya, Pak, IUP, Pak, ya, Satgas Penataan Ulang, Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Keppres Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penataan Lahan.

F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):

Penataan lahan.

Nah, tadi dengan gamblang Pak Bahlil menyampaikan, ternyata banyak juga yang sudah punya IUP, enggak operasi, kemudian punya IUP sekedar untuk digadaikan di bank, dan bahkan yang celaka itu perusahaannya sudah IPO, dana yang dari publik yang dipaparkan di OJK untuk perluasan kawasannya, ternyata tidak digunakan sesuai dengan semestinya. Jadi menurut kami, ketika dipaparkan seperti ini cukup gamblang, ternyata yang diambil langkah-langkah yang diambil dari Kementerian Investasi, ya bisa dibilang bijak, Pak, kami mengapresiasi itu. Akan tetapi ternyata di sini banyak celah-celah, yang kemudian timbul informasi yang bias. Jadi dari kami menyarankan, Pak, mungkin bisa berkaitan dengan dua satgas yang sedang aktif ini yang, Pak, ketuanya atau kepalanya Bapak, mungkin bisa lebih berkala dilaporkan kepada Komisi VI, supaya tidak timbul informasi-informasi yang bias bahkan sampai banyak istilah "amis" dan lain sebagainya, tapi saya tidak ingin, ingin ke ranah itu, Pak, supaya tidak ada informasi-informasi yang simpang siur, Pak.

Dan kemudian yang kedua, itu mungkin bisa juga, Pak, dibikinkan kanal informasi supaya muncul, Pak, 2000 sekian IUP tadi itu, kira-kira kenapa, oh ternyata ini masuk kriteria yang seperti ini, termasuk oh ternyata ini, oh cuman modal bodong, apa, modal IUP buat cari utangan di bank, jadi supaya tidak ada informasi-informasi yang bias, sekali lagi itu, Pak.

Secara keseluruhan kami mengapresiasi langkah-langkah yang diambil oleh Pak Bahlil, mudah-mudahan capaian-capaian investasi ke depannya semakin bisa lebih tinggi, bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita dan menekan angka kemiskinan.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Walaikumsalam,

Ibu Melani, silakan.

F-PD (Hj. MELANI LEIMENA SUHARLI):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

**Yang saya hormati Pimpinan dan teman-teman Anggota Komisi VI,
Yang saya hormati Pak Menteri Pak Bahlil beserta jajarannya,**

Memang banyak yang sudah disampaikan oleh teman-teman dan saya juga mengapresiasi atas pencapaian dari realisasi investasi yang mencapai 1.418,9 triliun, melonjak 17,5%. Tentunya capaian itu juga menyerap tenaga kerja yang memang sangat diperlukan untuk keberlangsungan kehidupan rakyat Indonesia yang sekarang memang memerlukan tenaga kerja yang lebih banyak untuk meningkatkan perekonomian. Dan tenaga kerja yang dicapai itu sebanyak 1.823.543 orang, itu tentunya saya mengapresiasi sekali atas realisasi yang melebihi dari target.

Kemudian juga saya mengharapkan, Pak Bahlil, juga, Pak Menteri, bisa mengklarifikasi semua yang ada pertanyaan-pertanyaan tentunya dari majalah yang tadi disebutkan, dari majalah Tempo dan sebagainya, untuk mengklarifikasi, sehingga kita sebagai juga Komisi VI sebagai mitra dari Kementerian Investasi, juga bisa lebih lega, karena saya tahu Pak Menteri sudah bekerja keras tapi jangan sampai isu-isu atau pemberitaan-pemberitaan yang negatif menjadikan kerja keras dari Pak Menteri menjadi tertutup.

Kemudian, saya juga ingin menanyakan, dalam sebuah pemberitaan pers di Jakarta, Pak Menteri menanya, menilai bahwa kenaikan pajak barang dan jasa tertentu atas jasa hiburan yang seperti diskotik, karaoke, dan klub malam yang ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75% akan mengganggu investasi di tanah air. Mohon dijelaskan bagaimana realisasi pajak dan barang jasa tertentu dengan investasi di Indonesia seperti apa? Apakah kenaikan pajak dan barang jasa tertentu berpengaruh terhadap investasi secara makro, seberapa besar pengaruhnya? Dan tentunya saja saya juga pada tahun 2023 merasakan pada waktu ada fasilitas yang diberikan untuk NIB, itu sangat membantu para pengusaha kecil, UMKM, dan saya selanjutnya mengharapkan NIB ini tentunya akan lebih menjangkau lagi, kira-kira di untuk penertiban NIB di tahun 2024 bagaimana realisasinya? Dan mana yang daerah-daerah yang ingin segera dicapai untuk membuat perekonomian tambah berkembang, tentunya meningkatkan perekonomian.

Kemudian juga saya mau menanyakan juga, jumlahnya UMKM yang tentunya masih berbadan usaha masih sangat didominasi dari lebih 90% atau 64 juta UMKM dan tentunya menargetkan berapa dari Kementerian Investasi untuk mendapatkan NIB ini?

Kemudian saya mau nanyakan juga, investasi sepanjang 2023 paling banyak masuk Jawa Barat dan DKI, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Banten. Bagaimana, investasi apa yang paling banyak yang diinvestasikan di DKI Jakarta? Kemudian investasi yang, yang, yang berinvestasi di Indonesia adalah negara Singapura, Cina, Hongkong, Jepang dan Malaysia, apakah negara-negara ini juga sudah menginvestasikan di IKN juga?

Itu mungkin, Pimpinan, yang saya akan tanyakan.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,

Baik, Pak.

F-PD (Hj. MELANI LEIMENA SUHARLI):

Sedikit, Pak Pimpinan, sedikit. Investasi yang di Jakarta, banyaknya investasi berupa apa? Terima kasih.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Baik, Pak Mufti.

F-PDIP (dr. H. MUFTI AIMAH NURUL ANAM):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pak Menteri Bahlil yang kami cintai dan seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan hari ini,

Pertama, tentu kami mengapresiasi atas kerja keras dan kerja cerdas Pak Menteri, kalau kita amati, paparan Pak Menteri tadi di halaman dua sepanjang, Pak Menteri duduk di Kementerian Investasi itu realisasi investasi selalu trennya di atas rata-rata, di atas target, dan hanya turun sedikit saat pandemi. Bahkan kalau kita amati di tahun 2023 target renstra, seperti yang tadi dipaparkan 1,99 triliun dan bahkan Pak Jokowi seingat saya menargetkan 1.400 triliun, yang saat itu kayaknya enggak mungkin, wah ini Ketum saya ini pasti besok ini enggak penuh target, ternyata tercapai juga itu Ketum, Pak Menteri, 1.418 triliun. Kami tentu mengapresiasi hal ini, ini sebuah inspirasi buat kami semua bahwa dalam kehidupan kita tidak ada yang tidak mungkin kalau dilakukan dengan kerja keras dan kerja taktis seperti yang Pak Menteri lakukan. Kalau ibarat naik mobil, Pak Menteri, ini bukan hanya di gas, tapi bukan hanya di ini, tapi sudah enggak pakai rem Pak Menteri ya. Tapi tentu bukan seperti *bocil* yang baru-baru ini menabrak mobil tidak pakai aturan begitu dan kami lihat Pak Menteri masih dalam koridor yang ada, tapi tentu target bisa tercapai.

Kemudian yang kedua, Pak Menteri, soal Tempo, Bocor Alus, tadi sudah banyak dibahas oleh kawan kami, kami tidak mau masuk dalam, tapi satu hal, kami mengapresiasi keberanian, Pak Menteri. Bahkan belum pernah dalam sejarah kami duduk di Komisi VI ini bahkan mungkin semenjak saya lahir ada menteri yang berani mengklarifikasi ke Tempo, bahkan Tempo datang ke tempat Pak Menteri. Tapi kalau menterinya ini main-main kayaknya ini enggak mungkin ya. Jadi kami juga, saya coba baca, kemarin saya cermati

32 menit itu, Pak Menteri, saya ulang sampai tiga kali, ya menurut kami ini penjelasan, Pak Menteri, cukup melegakan suasana kebatinan kami, karena kami jujur di Komisi VI ini juga ikut galau, Pak Menteri, karena saya, kami tidak mau rakyat menganggap kami ini sebagai DPR yang tidak mampu menjaga, tidak mau mengkritisi, minta, mitra kerjanya. Tapi harapan kami, apa yang disampaikan kawan-kawan kami nanti bisa dijawab dengan komprehensif agar hal-hal yang apa menjadi abu-abu bisa kemudian bisa semakin terang, begitu, dan kami percaya itu Pak Menteri bisa menerangkannya.

Kemudian, Pak Menteri, yang tiga, yang selanjutnya yang menurut saya jauh lebih penting dari semua isu yang ada hari ini adalah soal ramainya hari ini di media sosial skandal tambang timah, Pak Menteri, yang melibatkan suaminya Sandra Dewi, yaitu Harvey Moeis, yang di dalamnya juga kemudian ada, apa namanya, Helena Lim dan kemudian ternyata di belakangnya ada seorang mafia besar yang kami dapatkan infonya namanya adalah Robert Bono Susatyo, Pak Menteri. Dan kalau kita lihat, coba rakyat-rakyat kita ini sekarang cerdas, Pak Menteri, mereka coba menghitung-hitung, dari 271 triliun duit negara yang mereka ambil, yang mereka korupsi, yang merugikan negara sebesar itu, kalau dihitung-hitung itu rakyat harus nyari 1 miliar per hari, yang itu kalau 1 miliar per hari mereka baru bisa mengembalikan di 752 tahun, artinya ini bukan korupsi yang sedikit, Pak Menteri. Maka kami ingin tanya di tempat ini, kami jujur, suasana kebatinan kami terganggu, ke mana ya Kementerian Investasi ya? *Kok* tidak punya rasa tanggung jawab publik, tidak punya apa namanya, mohon maaf, dalam hal ini bukan Pak Menteri, tapi apa namanya, jajaran di bawah Pak Menteri, tidak ada kegalauan hati untuk ikut turut menyelesaikan persoalan ini, karena mau tidak mau ini juga terkait dengan Kementerian Investasi.

Maka kami minta pada kesempatan hari ini, Pak Menteri, semua usaha yang terafiliasi ke Harvey Moeis, yang kami lihat juga beliau pengusaha tambang, baik batu bara, nikel, dan sebagainya, juga Helena Lim, juga kemudian RBT yang ini kita tahu dan Pak mungkin Pak Menteri juga kenal, dan dia adalah seorang mafia-mafia tambang besar di negara kita, semua kami minta, semua tambang yang terkait dengan mereka untuk dicabut atau setidaknya dihentikan sampai urusan ini benar-benar tuntas, Pak Menteri. Nah, kami minta jawaban atas Pak Menteri soal hal ini nanti.

Kemudian yang keempat, Pak Menteri, sebagai bentuk mitigasi, hari ini KPK yang juga berkejar-kejaran dengan Kejagung saling, saling ingin mendahului terhadap kasus yang ini tidak kalah besar, yaitu soal korupsi yang motifnya hampir sama dengan di timah yaitu di Mind ID, Pak Menteri. Jadi harapan kami, mohon di cermatin semua perusahaan tambang yang terkait dengan Mind ID, yang terafiliasi dengan Mind ID, untuk diperhatikan, kalau memang, apa namanya, ada terkait dengan skandal atau isu-isu yang saya sampaikan tadi, untuk sementara dicabut atau dihentikan sementara waktu sampai ini benar-benar tuntas, karena yang kami dengar, kami tahu, bahwa nilainya jauh lebih besar dari korupsi di timah yang tentu ini dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat kita.

Itu *aja* dari kami, Pak Menteri, *matur nuwun sanget*. Terakhir kami sampaikan selamat, terima kasih banyak kepada Pak Menteri, sudah apa namanya, menjaga investasi kita.

Terus yang terakhir, Pak Menteri, saya lupa tadi, saya *pengin* tanya juga terkait target investasi yang sudah tercapai 1.418 triliun ini, dampaknya ke, ke UMKM kita ini berapa *sih*? Dan mungkin ada datanya berapa saja UMKM yang sudah mendapatkan dampak dari adanya investasi sebesar ini.

Terima kasih banyak, Pak Menteri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Walaikumsalam,

Oh, Saya pikir mau diungkap juga itu di Mind ID-nya apa *gitu kan*, itu tahapan berikutnya ternyata, Pak Menteri.

Baik, Ibu Luluk, *abis* itu Pak Deddy, dan Pak Khilmi, dan habis itu rasanya harus kita akhiri *nih* sesi tanya jawab, silakan.

F-PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.):

Ya, terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat sore,
Salam sejahtera untuk semuanya,

Yang saya hormati Pimpinan Komisi VI dan juga Anggota Komisi VI, Pak Menteri dan semua jajarannya yang hadir pada sore hari ini juga yang saya hormati,

Terima kasih, kalau apresiasi saya kira tadi beberapa teman sudah ya, Pak Menteri, ya, kalau kebanyakan pujian nanti kenyang duluan padahal belum buka puasa, iya terima kasih. Pak Menteri, ketemu dengan *penjenengan* ini *kan* agak, agak lumayan jarang ya karena memang dua kali kalau tidak salah, kita mau rapat bareng itu enggak jadi, jadi mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa termanfaatkan secara baik.

Korupsi di sektor pertambangan itu sudah melahirkan banyak sekali para doktoral dan Phd, Pak, bahkan ada istilah *predator states*, nah ini jadi korupsi yang juga bisa dilakukan oleh negara karena ada aturan, ada regulasi, dan ada oknum-oknum dan ada kekuasaan yang melindungi praktik-praktik korupsi itu *gitu*. Nah, hari-hari ini saya kira dengan adanya pemberitaan yang luar biasa yang tadi sudah disinggung oleh teman-teman, bukan hanya Tempo sebenarnya ya, bahkan kemudian ada Kompas, ada

teman-teman dari Advokasi Pertambangan, itu juga terus-menerus mengulik situasi dan juga korupsi yang ada di sektor-sektor pertambangan ini.

Nah, kita ini menjadi cukup prihatin sebenarnya dengan adanya satgas yang sudah dilahirkan, itu lalu sampai di mana bisa memitigasi potensi korupsi yang ada di sektor pertambangan. Contoh kasus *aja*, kasus timah, itu kan tidak dikeluarkan oleh, Bapak, *gitu*, tidak dimunculkan oleh kementerian kita, tetapi justru dikeluarkan oleh Kejangung dan kemudian ketika *udah* ini *diramein* baru kita melakukan konfirmasi kepada mitra kita, *gitu*. Sampai sejauh mana *sih* sebenarnya ini semua *udah* diantisipasi, apalagi kemudian ditengarai bahwa praktik-praktik korupsi ini *udah* berjalan sekian lama. Katakanlah kalau kasus timah itu dari 2015 sampai sekarang *loh*, Pak, itu artinya *kan* Bapak juga sudah menjadi ketua Satgas itu, apalagi di dalam isu timah itu juga konon ada unsur-unsur permainan IUP-IUP dan seterusnya lah ya, mulai dari yang ilegal seolah-olah dilegalkan dan sebagainya. Tapi intinya itu semua, apakah bukan menjadi ranah yang termasuk dikonsolidasi dan di apa ya, di, diurus *gitu* oleh satgas di bawah kendali Pak Bahlil.

Nah, cuma yang menjadi keprihatinan yang lagi, bahwa kemudian di media sosial justru nama Pak Bahlil ini yang kemudian disebut-sebut *gitu loh*, jadi pihak-pihak yang seharusnya menegakkan aturan, yang harusnya itu juga *proper*, *tapi* kemudian justru yang dianggap mohon maaf ini, ikut terlibat di dalam silang sengkaret soal pertambangan, soal perizinan, soal tata kelola, soal kemudian kepemilikan lahan, dan lain sebagainya. Nah, saya kira ini menjadi kewajiban bagi kita semuanya untuk membuat terang-benderang dan Bapak memiliki kesempatan itu untuk menyampaikan ke kita. Jadi kalau kita ditanya oleh masyarakat banyak, apa yang sudah dilakukan oleh Komisi VI, minimal kita punya jawaban sementara ya, jawaban lebih lanjutnya ya nanti tergantung keputusan pimpinan, seandainya misalnya ada kebutuhan untuk memperdalam hal-hal yang terkait dengan isu investasi, pertambangan ya, termasuk juga isu korupsinya. Apakah kemudian itu dibentuk Panja atau tidak, nah, ini saya kira kita akan persilakan kebijakan dan kebijaksanaan para pimpinan, tetapi menurut saya ini juga menjadi sangat penting.

Nah, terus yang kedua, Pak, saya juga *kepengin* tahu, sebenarnya yang menjadi ukuran bagi satgas ketika mencabut IUP ataupun kemudian memulihkan, itu yang menjadi dasar pertimbangan utama itu antara lain apa *aja sih gitu*, selain misalnya dicabut karena tidak operasional atau tidak produktif, nah, apakah ada hal yang lain? Karena kalau konteksnya ini perusahaan-perusahaan semata-mata tidak produktif, ada juga *kan* yang produktif, tetapi misalnya dicabut. Atau sebaliknya, yang tidak produktif sekian lama, tapi ternyata IUP-nya juga tidak dicabut. Nah, ini *kan* kita mau lihat juga *gitu* apa ambigunya dan juga *double standart* yang dilakukan oleh Bapak *gitu* di dalam mencabut atau memulihkan, makanya kita juga *kepengin* tahu sekaligus penasaran saya, dari sekian banyak yang dicabut nanti tolong data dikasih, Pak, ya ke Komisi VI. Jadi total IUP yang dicabut dan juga total IUP yang dipulihkan.

Nah, apakah yang terkait dengan pertimbangan kerusakan ekologis, nah, ini juga termasuk bagian yang menjadi pertimbangan pencabutan IUP

apa tidak, *gitu*? Karena kalau ini misalkan jadi pertimbangan, *kok* sampai ada skandal timah, yang bahkan nilai kerugian ekologisnya *aja* 271 triliun, tetapi *kok* kemudian *kok*, mohon maaf *nih*, *kok* enggak *terapa-apain* selama ini, *gitu*. Nah ini, ini *kan* akhirnya menjadi pertanyaan banyak pihak dan itu banyak juga, Pak, WA di saya dan juga di medsos saya *gitu*, karena mereka *nitip-nitip* pertanyaan ini, ketika saya bilang ke mereka, saya mau akan ada Raker dengan Pak Menteri Bahlil, dan mereka juga mendesak ini yang kemudian perlu untuk diungkap bersama.

Ada standar yang sama enggak memperlakukan perusahaan-perusahaan yang dicabut atau kemudian dibolehkan? Nah, ini yang mungkin menurut saya bisa menepis kecurigaan apakah ada *kongkalikong*, apakah kemudian ada praktik-praktik korupsi, mohon maaf, termasuk tadi yang katanya “bau amis” itu ya, karena memang ada standar yang tidak sama ketika mencabut atau kemudian memulihkan IUP-IUP ini *gitu*, termasuk perusahaan-perusahaan yang ditengarai punya hubungan misalnya dengan Bapak atau kemudian teman-teman Bapak.

Nah, yang kaitannya dengan ekologi, Bapak, saya memang agak sangat serius karena mohon maaf, sampai Ombudsman *aja* misalnya juga *udah* memberikan peringatan untuk hati-hati, *gitu* ya, kemudian *Amnesty International* juga kemudian sudah mengingatkan jangan sampai ada hak-hak rakyat yang kaitannya dengan soal lahan ini kemudian malah kemudian akan dikorbankan hanya karena *favoritism*, kita yang ketika ada sengketa dengan pihak investor, nah ini, ini menurut saya penting.

Termasuk yang terakhir sekali, Pak, ini saya juga agak terganggu ketika ada 200 warga di Kecamatan Pakuan di IKN, yang mereka harus, apa, membongkar ya, kalau enggak salah, rumahnya atau, atau apa *gitu*, dan tidak boleh melakukan aktivitas tertentu karena dianggap ini akan mengganggu IKN. Dan kalau tidak salah, *Amnesty International* sudah memperingatkan juga. Nah, apakah ini yang kemudian menjadi juga standar bagi kementerian khususnya satgas ya, Pak, ya di dalam menerapkan, apa namanya, keramahan kepada investor, sehingga sampai harus mengusir atau mengorbankan warga masyarakat asli. Yang saya ingin tekankan, jangan sampai kita mengulang kecerobohan kita ketika kita memberikan ruang fasilitasi yang begitu mewah kepada investor di Rempang, tetapi kemudian berakibat konflik yang luar biasa dengan masyarakat setempat dan ini jangan sampai terjadi di IKN, Pak. Kalau sampai IKN terjadi konflik agraria dengan masyarakat setempat, saya enggak bisa perkirakan bahwa semua upaya baik yang dilakukan oleh pemerintah ini bisa *blem*, bubar. Ya karena apa? karena nilai sensitivitasnya yang pasti akan sangat tinggi ya, kita tidak ingin memancing memori kita di masa lalu yang terkait dengan Kalimantan, tetapi semua harus dijaga dengan sebaik-baiknya dengan penuh martabat.

Terima kasih, Pak Bahlil.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Walaikumsalam,

Baik, Pak Deddy silakan.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Terima kasih, Pimpinan.

Yang, aduh apa yang putus ini. *Oke*, sudah.

**Pimpinan, Anggota Komisi VI yang saya hormati,
Pak Menteri, Pak Bahlil, dan jajaran Kementerian Es, apa, Investasi dan
BKPM,**

Sudah banyak teman-teman bicara, tapi saya kira saya mau lebih banyak sedikit ke hal-hal yang bersifat fundamental dan, apa namanya, filosofislah.

Yang pertama, di halaman 11, di sini kelihatan, apa namanya, sistem *thinking* yang menurut saya harus diperbaiki. Di situ dikatakan, fokus pada sumber daya alam yang menjadi keunggulan Indonesia dibandingkan negara lain. Saya hampir belum menemukan negara-negara yang sejahtera berkelanjutan hanya mengandalkan sumber daya alam ya, tetapi kehancuran banyak, mungkin kita kesampingkan negara penghasil minyak sekarang yang kaya raya, tapi rakyatnya *kan* belum tentu juga ya.

Jadi kalau *back of mind*-nya yang bisa kita andalkan untuk kemajuan kita itu hanya sumber daya alam, Pak, kita bisa *cilaka*, Pak, karena semua sumber daya alam kita itu pasti akan habis. Nikel berapa tahun akan habis, batu bara berapa tahun akan habis, bauksit berapa lama. Jadi saya kira *mindset*-nya harus *dirubah*, bahwa investasi itu adalah modal dasar pembangunan nasional, dengan begitu kita menggunakannya secara hati-hati. Tidak saja untuk kepentingan manusia yang hidup pada hari ini, *tapi* anak-anak cucu kita yang kemudian juga membutuhkannya. Jadi *enggak* bisa kalau menurut saya kita umbar habis-habisan tanpa ada *road map* yang jelas dan memadai, tidak saja soal, apa namanya, nilai tambah, dukungannya bagi ekonomi dan kesejahteraan kita, tetapi juga pemahaman kita bahwa kekayaan alam kita ini kita pinjam, Pak, dari anak cucu kita, Pak, jadi kita *enggak* bisa semena-mena *gitu*, itu yang pertama.

Yang kedua, kalau saya lihat, ya berbagai presentasi ini, pokoknya kalau setiap kali, Pak Bahlil, Pak Menteri itu presentasi, kita keluar merokonya lebih sedap, Pak, ya, karena angka-angkanya *magnificent* katanya *kan*, tidak pernah *let us down* lah, bagus, *gitu*. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya kan kita tidak pernah sampai ke detail, misalnya oke kita sebut 101 triliun, PMA 743 ya, PMDN 7, 674, luar Jawanya 51%, kita *enggak* tahu proyek apa saja itu, Pak. Di tiap proyek itu, berapa banyak anak bangsa yang bekerja, ya, di setiap proyek itu. Yang bekerja di situ berapa persen dari masyarakat lokal ya, sehingga kita bisa dengan percaya diri

mengatakan, "Kami bawa investasi untuk memakmurkan, mereka yang ada di sana sejak leluhurnya ada di tempat itu". Kalau dari sisi aturan, sudah, saya kira, Pak Bahlil, berkali-kali menyebut itu, tetapi realitanya seperti apa, kita enggak pernah tahu, Pak Bahlil. Mohon maaf, Pak Menteri, kita enggak pernah tahu. Kecuali data-data yang diberikan kepada kita di sini, kita enggak pernah tahu karena Pak Menteri enggak pernah *ngajak* kita juga untuk melihat, kita enggak tahu *tuh* EV baterai dengan CTL dan LG kayak apa. Padahal kita, bukan kita lah, presiden, capres, cawapres kemarin *kan* selalu mengutarakan hal itu. Harusnya kita di Komisi VI ini menjadi pihak pertama yang diajak oleh Kementerian Investasi sehingga kami juga bisa menjadi perpanjangan mulut untuk sampai kepada konstituen, mengabarkan bahwa ini memang *this is a good thing for this nation gitu* loh, ini kita enggak pernah.

Jadi, saya berharap ke depan, Pak, setiap tahun, kalau bisa kita dapat buku putih, ini *loh* investasi, katakanlah ini 1.418 triliun, Januari - Desember 2023, kami minta *dong*, Pak, datanya, Pak. Dia industri apa saja? Dari mana investornya? Adakah PMDN-nya di dalam juga terlibat? Adakah vendor lokalnya terlibat? Berapa tenaga kerja dalam negeri? Berapa kemudian masyarakat di sana ekonominya bisa didorong? *Kan* ini hal-hal yang harus kita, kita sampaikan juga ke publik, supaya rakyat tahu pemerintah bekerja dan hadir dan betul-betul memberikan manfaat.

Ini saya kira, Pimpinan, kalau bisa dicatat sebagai rekomendasi kita, kita tidak mau, supaya kayak Menteri BUMN, Pak Menteri, tiap tahun ada *gathering* ini *loh*, apa namanya, dividen, pemberi dividen paling tinggi, perusahaan dengan, apa namanya, kondisi keuangan terbaik, *kan* kita enak. Sehingga kita juga bisa menjadi mitra yang, yang setara, *gitu*. Kalau begini, terus-terang Pak Bahlil, ini kalau kita semua ini enggak teman sama Pak Bahlil, saya kira kita juga malah sikut *nih* acara-acara presentasi seperti ini, karena yang kita dapat, kalau bahasa anak gaulnya ini, garing, Pak. Karena habis dari sini, saya juga kalau mau *ngomong* di luar, enggak ngerti saya mau *ngomongin* apa di sini, karena tidak detail. Kalau cuma bilang investasi berhasil nambah, *that's it*. Selebihnya kita enggak bisa ngomong karena tidak ada visualisasi, enggak ada imajinasi di kita, Pak, ya itu. Jadi bagaimana dia memang mampu mengangkat harkat, martabat rakyat setempat dulu yang kita *iniin*, jangan nanti tenaga kerja lokal disebut, tapi datang dari Jawa, datang dari Sumatera, datang dari mana-mana, Pak.

Oleh karena itu, kalau memang sudah ada aturan bahwa yang namanya investasi apalagi dia sumber daya alam di daerah, yang harus bikin MoU yang mengikat, bagaimana proses pemberdayaan warga setempat melalui pelatihan, pendidikan, dan sebagainya, supaya memang mereka nanti ketika pabrik itu dibangun, betul-betul yang pertama mendapat kesempatan adalah rakyat setempat. Karena tanpa itu, saya kira semua pengusaha itu pasti pengin yang sudah jadi, Pak. Kalau sudah jadi, Pak, orang setempat, misalnya saya di Kalimantan Utara, ada proyek kawasan industri hijau terbesar di dunia, katanya. Sampai hari ini, Pak, *security*-nya pun, Pak, masih dari luar sana, Pak, ini *kan* artinya tidak ada apa.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Pak Deddy, boleh kita...

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Tidak ada perencanaan.

Ini soalan sebentar, saya akan selesaikan cepat.

Ini saya mohon, Pak Bahlil, dibuat bentuk apakah itu, ya aturan, MoU yang mengikat atau bahkan kalau perlu di-*insert* dalam regulasi, *gitu*, Pak, ya, supaya kita tidak terus-menerus menjadi masalah.

Yang kedua, soal lapangan pekerjaan, kita tahu pada tahun 2023 angkatan kerja kita 147,71 juta orang, sementara investasi yang kita dapatkan hanya mampu mempekerjakan 1,8 juta orang, tingkat pengangguran kita 7,86 juta, jadi hanya segitu jumlahnya yang bisa disedot melalui investasi yang ribuan triliun ini, Pak ya. Oleh karena itu menjadi sangat penting di dalam investasi ini, UMKM itu betul-betul dilibatkan, Pak, karena apa? 96% tenaga kerja Indonesia itu diserap oleh UMKM, Pak, jadi kita enggak boleh main-main di urusan dengan UMKM ini, Pak, ya, itu saya kira penting sekali, Pak.

Lalu yang keempat, ini terkait koordinasi dengan kementerian-kementerian lain yang terkait, *kan* Kementerian Investasi sudah diberikan oleh Omnibus Law begitu banyak kewenangan, dalam hal perizinan, dalam hal lain-lainlah ya. Tetapi *kan* sebenarnya banyak *stakeholder* yang harusnya juga punya, apa namanya, kewenangan. Saya ingin tahu sejauh apa sinergi kita dengan Kemenaker, misalnya, dengan Kementerian Koperasi, dan UMKM, Kementerian Perindustrian, bahkan pemerintah-pemerintah daerah, bagaimana itu masuk dalam satu sistem, Pak? Jadi jangan soal, karena Pak Bahlil capek ke mana-mana, datang orang, tapi di bawah enggak tahu, Pak, ini *kan problem* juga buat kita. Jadi saya berharap ada *road map*, Pak, *road map* investasi. Kita tahu di mana *aja* kita mau ada *investment*, investasinya di bidang apa *aja*? Tenaga kerja apa saja yang dibutuhkan? Ini semua harus menjadi, menjadi, apa namanya, kepentingan bagi kita semua.

Yang kelima, terkait dengan PSN. Beberapa minggu lalu saya membaca tentang PSN, Pantai Indah Kapuk dan PSN, apa itu, Serpong ya. Saya agak terkaget-kaget, Pak, membacanya, setahu saya mereka *development* murni, swasta, kenapa bisa mereka dapat PSN statusnya? Kenapa? Saya bertanya-tanya dalam hati, ada apa ini? Apakah mereka mau disuruh bangun perumahan, rumah murah untuk rakyat? Atau dari investasi mereka, berapa besar dialokasikan untuk kepentingan rakyat dan negara? Ini saya kaget, Pak, kenapa bisa dia menjadi PSN? Ini benar-benar melukai, kalau menurut saya. Jadi tolong nanti dijelaskan secara gamblang, kenapa *sih* proyek swasta yang menghasilkan begitu banyak uang, bisa dijadikan PSN oleh negara? Padahal kita tahu dulu misalnya PIK itu banyak sekali persoalan itu. Sekarang malah jadi PSN, saya enggak masuk akal, Pak, ya.

Lalu yang keenam, soal Rempang, kami pengen tahu status, Pak. Pak Menteri ingat, dulu sebelum itu, saya pernah datang bertandang *ngobrol-ngobrol* dan kita sudah tahu bahwa nanti pasti akan ada masalah. Nah, tetapi *kan* ini seolah-olah menguap, kita pengen tahu, Pak, apa yang terjadi? Karena saya tahu Pak Menteri sudah ke sana, dialog dengan banyak pihak, progresnya seperti apa, Pak? Karena banyak pembelajaran yang bisa kita dapat di sana untuk masa, apa namanya, proyek-proyek lain di masa depan, Pak. Kita ingin menghindarkan bagaimana Rempang itu tidak diduplikasi, jadi kita tidak mengalami masalah yang sama dengan proyek-proyek yang, yang lain. Lalu.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Pak Deddy, bisa dipercepat, Pak.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Terakhir soal hilirisasi, terakhir, Ketua.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Nanti enggak ada waktu jawab soalnya.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Iya, kan nanti bisa tertulis, kalau Bahlil *ngomong*, kita nanti ketawa *aja* melulu semua nanti.

Jadi soal hilirisasi ya, ini *kan* cuma hilirisasi baterai, *nih*, yang paling banyak *nih*, CPO, *oke* lah yang sudah ada ini. Saya ingin dapat gambaran yang utuh, Pak, benar enggak kita *jalanin* ini, Indonesia masuk menjadi negara yang keluar dari *middle income trap*, Indonesia Emas katanya, *how we achieve that*, Pak?

Saya kasih contoh, Pak, soal rumput laut di Kalimantan Utara. Kalau kita ekspor ke Cina, ke Jepang, ke Taiwan, mentah, itu enggak kena pajak, Pak. Begitu kita olah, dikenakan pajak impor oleh pemerintah, Pemerintah Cina. Pertanyaan saya, lalu apa gunanya berbagai, berbagai perjanjian dagang yang kita buat? Ini *kan* menyebabkan kita tidak pernah bisa membangun industri nilai tambah, akhirnya yang rugi rakyat, padahal di sana setahun bisa 600.000 ton, harus jual mentah. Kalau dia diolah sedikit, Pak, langsung kena *tax* oleh Pemerintah Tiongkok. Nah, saya takut ke depan, ini juga yang kita hadapi dengan komunitas-komunitas lain. Kalau EV baterai, nikel, gampang, Pak, tapi yang kerja di pabrik nikel berapa banyak *sih*, Pak? Rumput laut di Kalimantan Utara itu, di Sulawesi Selatan, Pak, Sulawesi Tenggara, di mana-mana, itu menyangkut jutaan rakyat kita, ini bagaimana *gitu*.

Jadi itu, pertanyaan dari saya, Pak Menteri, mungkin setelah ini kita bisa diskusi lagi nanti diatur, Pimpinan, terutama terkait dengan tadi kita ingin *mapping* dan mendapat informasi yang lengkap semacam *outlook* dari investasi yang masuk ke Indonesia atau dikerjakan oleh PMDN di tahun 2023, Pak, jadi kita ada kesinambungan.

Dan izin, Pimpinan, perlu saya ingatkan bahwa kita pernah punya Panja Investasi Pertambangan, saya usulkan kita untuk, saya enggak tahu apakah pada masa ini atau masa depan, untuk bikin lagi panja itu.

Dan terakhir, Pak Bahlil, ini pengalaman saya pribadi, ini terkait dengan kemarin Pemilu. Saya bertemu dengan orang pelaku tambang batu bara, mereka bilang mereka RKAB-nya ditahan kalau tidak “turut kekuasaan” dan pada dua hari sebelum pencoblosan hari H, di Dapil saya itu masuk 10 mobil dari Kalimantan Timur membawa uang *cash* untuk operasi politik. Ketika kami telusuri, ketika tinggal sopirnya yang datang ngakunya mereka perusahaan tambang di Kalimantan Timur yang RKAB-nya tidak akan disetujui kalau mereka tidak ikut *cawe-cawe*. Jadi ini bukan “katanya”, “katanya” ya. Saya berkepentingan menyampaikan di ruang sidang ini supaya Pak Bahlil tidak menjadi korban fitnah juga ya, supaya ini terang-benderang. Saya kira itu penting, karena kita mau, kita yang duduk di sini semua punya kehormatan dan martabat yang terjaga dengan baik, jadi hal-hal seperti itu saya kira harus diklarifikasi sebagaimana tadi soal Tempo itu.

Saya kira itu, terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Baik, terima kasih. RKAB yang *keluarin* Menteri ESDM bukan investasi.

Baik tinggal dua, Pak Khilmi dan Pak Tommy, habis itu kita tutup, karena jam 4 kita kesepakatannya adalah untuk menyelesaikan rapat.

Silakan, Pak Khilmi.

F-P. GERINDRA (KHILMI):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

**Yang saya hormati Ketua Komisi VI beserta Anggota Komisi VI,
Yang saya hormati Menteri Investasi/Kepala BKPM, Pak Bahlil,**

Jadi Pak, saya ini mau tanya dulu, interaksi dulu ya, Pak, ya sebentar iya. Pak, itu proyek PI (Pupuk Indonesia) itu *kan* mau bangun di Bintuni, terus mau dipindah ke Fakfak, tanah kelahirannya Pak Bahlil *kan gitu*, jadi benar enggak, Pak, itu, Pak? Masalahnya ini *alhamdulillah* teman-teman *kan* jadi lagi, 5 tahun *kan* masih bisa monitor *gitu* loh, dijawab dulu, Pak.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Saya jelaskan singkat atau butuh penjelasan?

F-P. GERINDRA (KHILMI):

Singkat, padat, terpercaya.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Oke.

Jadi menyangkut dengan pembangunan Pupuk Kaltim, pabrik Pupuk Kaltim yang ada di Papua, awalnya itu adalah dilakukan di Bintuni, setelah dicek, draf untuk kedangkalannya itu, itu hanya kurang lebih sekitar 7 sampai 8 meter, kedalaman, maka diisyaratkan untuk harus mencari lahan yang minimal 14 meter. Di Bintuni kalau dibangun, itu harus bangun kurang lebih sekitar, menurut Pupuk Indonesia, karena dia yang mengetahui secara teknis itu adalah Tim FS dari Pupuk Indonesia, ini penjelasan mereka ke saya. Itu kurang lebih sekitar hampir 2 kilo, jeti-nya, maka kemudian dicarilah lahan alternatif. Dan yang kedua, alternatif yang paling dekat itu adalah di Fakfak, maka dapatlah itu di Fakfak.

Yang kedua, gas yang diambil itu adalah gas dari Genting Oil, yang sumurnya sebagian itu ada di Fakfak. Diputuskanlah lewat rapat antara Pupuk Indonesia dan Pupuk Kaltim, kemudian Menteri ESDM dan kami, waktu itu dengan Menteri BUMN, yang penting FS-nya dan YRR-nya masuk, maka diputuskanlah di Fakfak. Itu, Pak Khilmi yang mulia.

Terima kasih.

F-P. GERINDRA (KHILMI):

Oke, terima kasih.

Pak Bahlil yang, jadi begini, Pak, hitungan ya, hitungan semenjak Pak Arifin Tasrif jadi Direktur Pupuk, itu membangun pupuk di daerah sana itu FS-nya itu tidak masuk, jadi *kan* harus cari alternatif, *kan* begitu, Pak. Sebetulnya *kan* kalau kita ini *kan* mem, gas itu *kan* bisa dibuat industri hulu di sana, tidak dibuat untuk pupuk *aja*, apalagi pupuknya yang dibangun Urea. *Udah* kelebihan, kita. Yang harus dikejar itu *kan* NPK saat ini *tuh*. Jadi saya nanti PI juga akan saya *tanyain*, saya tanya Bapak dulu, apakah kalau ini ada kegagalan, mau bertanggung jawab enggak? Karena jadi Direktur BUMN itu enak, Pak, ada rugi, enggak tanggung jawab. Kalau ada untung dapat tantiem, gaji masih tetap tinggi terus, *gitu loh*. Jadi saya ini *ngomong* ini karena *alhamdulillah* saya masih terpilih lagi *gitu*, jadi 5 tahun *kan* bisa monitor kalau saya ditugaskan fraksi di sini, *gitu loh*. Jadi jangan asal bangun, asal bangun, itu *kan* bisa dibuat alternatif, di sana itu gas bisa dibikin bensin, kenapa investasi di sana *kok* enggak dibikin bensin *aja*? *Kok* pupuk yang Urea, yang kebutuhannya di sini udah tercukupi, jadi pakai otak *dikit, gitu*.

Ini *masalahe*, pemerintahan ini *kan* ketahanan pangan, energi, ketahanan negara, itu yang harus diutamakan, jadi di sana itu harusnya dibikin ketahanan energi, masalahnya pupuknya ini sudah tercukupi *gitu loh*, Pak.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Usulannya yang *direct aja*, Pak, jadi apa yang Bapak mau usulkan?

F-P. GERINDRA (KHILMI):

Usulannya, ya kalau dibangun pertanggungjawabannya ke Pak Bahlil sama Dirut PI ini, ada enggak besok *gitu loh*, itu *aja*, Pak. Jadi dari saya ini masukan *aja gitu loh*, pertanyaannya itu *aja*. Jadi ini dari zamannya Pak Arifin Tasrif sampai ganti tiga direksi, empat direksi itu hitungannya tidak pernah masuk, karena di situ gasnya cuma 17 tahun, apalagi bikin pipa 80 Km, *gitu loh*. Ini harus dipegang *gitu loh*.

Itu *aja* dari saya, Pak Ketua, karena ini mau FGD, jadi itu dari saya.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Walaikumsalam,

Baik, Pak Tommy, enggak jadi?

Terima kasih, kalau begitu memang sudah harus kita akhiri. Bapak, sebagian besar ini sudah harus dijawab tertulis, kalau ada yang mau disampaikan secara lisan, sangat singkat.

Silakan, Pak Bahlil.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VI yang saya muliakan dan saya hormati,

Izinkan saya untuk menyampaikan hal teknis nanti ditulis, seperti sahabat saya, Pak Deddy, tadi sampaikan. Namun ada beberapa yang saya harus *stressing* karena ini terkait agar informasinya tidak bias.

Yang pertama, dari Pak Prof Harris, menyangkut dengan pemberitaan salah satu majalah, saya terima kasih. Inilah bentuk kecintaan Prof kepada kami di Kementerian Investasi dan satgas untuk membuka. Yang pertama, saya mau sampaikan bahwa pemberitaan di salah satu media yang lewat *podcast* dan majalah, itu sudah saya melakukan klarifikasi, Pak Harris, dan

majalahnya hari ini keluar, termasuk saya sudah meladeni “Bocor Halus” dan semua tuduhannya itu saya klarifikasi di situ. Bahkan persepsi mereka terhadap Keppres Nomor 1 Tahun 2021 tentang Satgas Pendataan, tentang Satgas Percepatan Investasi, yang seolah-olah, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Harris, satgas inilah yang memverifikasi 2.078 IUP, itu bohong besar. Akibat bohong itulah, kemudian datanya rusak kayak begini. Dan saya sudah tantang mereka dan saya bawa itu ke Dewan Pers. Karena 2.078 IUP bukan ditentukan oleh satgas berdasarkan Keppres Nomor 1, tapi 2.078 IUP itu adalah betul-betul hasil verifikasi, identifikasi, yang dilakukan oleh menteri ESDM yang notabeneanya kader PDIP, Pak Harris boleh cek itu. Kalau itu saya salah, saya siap berhenti dari menteri, enggak, *fair aja*.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Eenggak, saya kira, Pak Menteri, bukan kader PDIP, Pak.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Oh salah ya, kalau begitu mohon maaf .

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Cabut itu.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Saya pikir, ya saya cabut kata-kata saya.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Karena kalau soal dibilang kader, nanti Bu Sri Mulyani juga dibilang kader, Pak Basuki juga dibilang kader.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Saya mohon maaf, saya dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, saya cabut kata-kata, saya mohon maaf, Pak Deddy, kalau itu salah, kita *fair, gentle*.

Jadi maksud saya adalah, teman-teman, Bapak-bapak semua yang terhormat, kalau saya salah, saya akan pertanggungjawabkan itu, saya *fair*, *tapi* saya juga tidak setuju kalau informasi yang salah, kemudian kita kembangkan.

Yang kedua, tentang perusahaan Meta, ini Prof Darmadi, yang mulia guru saya ini, Prof, Saya mau sampaikan, PT Meta itu adalah betul pemiliknya PT Bersama Papua Unggul dan saya beli itu tahun 2012. Di dalam klarifikasi saya dengan Tempo, saya katakan bahwa saya belum sah jadi menteri, saya bukan pengangguran, saya anak kampung, dan saya mendapatkan IUP itu dengan membeli, bukan hasil *nego-nego*, bayar pajak. Pertanyaan berikut

adalah, kenapa dia tidak dicabut? Saya ingin menjelaskan, di Tempo, di, di Bocor Alus itu juga sudah saya jelaskan blak-blakan di situ. Saya katakan bahwa syarat untuk mencabut IUP yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM yang seperti apa yang saya sampaikan tadi, terkecuali, apabila ada IUP yang tidak beroperasi akibat tidak ada RKAB, tapi karena memang IPPKH-nya belum ada, itu enggak bisa kita cabut, andaikan pun kita cabut, kita harus pulihkan, karena itu *dzalim* namanya. Karena pengusaha punya hak untuk mengajukan IPPKH, tapi kalau IPPKH-nya enggak dikasih oleh pemerintah, mau masukkan penjara itu pengusahanya? Dan saya kembalikan itu. Dan tidak hanya, tidak hanya Meta. Dan Meta itu sudah mengajukan IPPKH sejak 2015-2016, belum keluar, dan di 2022 itu baru keluar IPPKH-nya, dan sekarang sudah mulai bekerja. jadi dimananya? Kalau itu membawa di pengadilan di Belanda dan Denmark pun, saya berani mempertanggungjawabkan itu, itu pertanyaan yang kedua.

Yang ketiga, tentang Perpres 70, yang diasumsikan seolah-olah bahwa Bahlil membagi-bagi IUP kalau, ini ada bahasa Bocor Alus-nya *nih*, kalau rakyat miskin dikasih bansos, masyarakat *elit* dikasih IUP. Ini kan bohong besar sekali ini, belum ada itu pembagian IUP berdasarkan Perpres 70 itu dan saya sudah klarifikasi itu di Bocor Alus. Investigasi seperti apa yang teman-teman lakukan ini? Belum ada sama sekali yang dibagi, yang ada *suudzon aja* bawaannya. Jadi, Pak, mohon maaf, belum ada, Yang Mulia, belum ada sama sekali yang dibagi, sedikit pun, biar *clear* ini. Jadi apa yang disampaikan itu.

Yang kedua, bagaimana mengaktifkan, *kan* yang ditengarai itu, Pak Harris, itu adalah IUP nikel, bahkan ‘Bau Amis’ mungkin karena saya orang Papua jadi badan saya tidak sewangi mereka kali. Saya sampaikan mereka di situ dan di keputusan Dewan Pers, Pak Prof, itu memang dijatuhi sanksi untuk meminta maaf kepada saya, sebagai penggugat, melanggar Pasal 1 dan teman-teman media pasti *ngerti* Pasal 1 isinya apa, termasuk substansi. Jadi kenapa harus kita perdebatkan sesuatu yang sudah dimaafkan? Minta maaf *kan* berarti salah *dong*. Kalau hari ini kita masih main korek-korek itu, mari kita diskusi kepada sesuatu yang salah. Dan Bapak-bapak semua mengajarkan saya untuk berbicara suatu kebenaran, jadi saya enggak mauanggapi itu lagi, *gitu loh*.

Yang berikut, menyangkut isu ada upeti, saya sudah *tanyain* ini semua anggota satgas saya. Jauh hari sebelum Bocor Alus keluarkan itu dan tulisan media itu, saya sudah, mereka wawancara saya *doorstop*, saya katakan, kalau ada yang seperti itu laporkan kepada aparat penegak hukum, agar kita tidak terprovokasi dengan isu, laporkan saja, itu pun mereka tidak laporkan. Pemberitaan ada, karena menyangkut dengan nama baik institusi yang saya pimpin dan menyangkut pribadi saya, saya laporkan ke Bareskrim. Pak, kalau saya melakukan itu, Pak, berpikir 70 kali lipat kali melaporkannya itu, Pak, sendiri Pak. Dan saya minta kepada majalah itu, “Ayo bantu saya kita laporkan ini”. Enggak, media, kalau itu *kan* LSM, Pak, saya enggak perlu tanggapi LSM, karena itu dua hal yang berbeda. Kalau LSM itu *kan* membongkar seolah-olah menggurita bisnis saya, gagah juga saya, Pak, ternyata punya banyak pengusaha, punya banyak perusahaan juga ternyata. Perusahaan halal,

kenapa saya harus malu, Pak, terkecuali saya maling, Pak. Kenapa harus aneh-aneh?

Jadi, saya ingin menyam, Ibu Luluk yang saya muliakan, mohon maaf, Bu, saya kalau terkait dengan urusan ini, Bu, kalau itu betul saya melakukan pelanggaran, saya siap untuk bertanggung jawab. Jadi jangan sampai ini urusan barang ini dijadikan sebagai barang yang bikin kita pusing. Dan waktu kemarin, mohon Bapak-bapak semua yang saya muliakan, saya sudah klarifikasi itu secara terang-benderang, selama 33 menit yang sudah ditayangkan oleh Bocor Alus pada hari Sabtu tepat pada pukul 11, dan hari ini sudah dimuat di koran Tempo, sebagai bentuk pertanggungjawaban moralitas saya untuk mengeksekusi dan menjalankan rekomendasi dari Dewan Pers untuk menjelaskan hak jawab secara proporsional. Jadi apalagi yang saya perdebatkan?

Saya menyarankan kepada Bapak-bapak semua, kalau memang ada terindikasi begitu, bantu saya, kita laporkan ke Bareskrim karena saya sudah bikin laporan itu, supaya cepat ini kita buka, supaya jangan kita membuat polemik yang, yang tidak berkesudahan. Dan saya sudah minta untuk mereka diperiksa, tim saya, supaya tidak ada fitnah. Dan saya juga meminta 33 perusahaan yang sudah kita aktifkan IUP-nya, yang nikel itu, untuk diperiksa juga. Saya punya ketakutan, Pak, kekhawatiran, jangan sampai, apa nama, narasumber yang di, di, di, di *ditanyain* oleh teman-teman media, saya mengkhawatirkan jangan sampai narasumbernya yang, apa ya, yang tidak paten punya *gitu loh*. Ya *wallahualam* ya, saya enggak mau menyalahkan ini, ini saya mau membantu, ini saya mau membantu. Jadi, Pak Prof Harris, saya mohon maaf, Pak, saya harus ngomong ini karena kesempatan, ya.

Yang kedua, Pak, saya mau sampaikan juga, mengaktifkan, itu prosesnya kolektif kolegial, *ndak* bisa Bahlil Lahadalia hanya menandatangani itu Prof, harus saya rapatkan dengan tim satgas dan tim satgas itu terdiri dari kementerian teknis dan Kementerian Investasi. Kalau teman-teman Kementerian Investasi *teken*, memulihkan, sementara menteri teknis *enggak* bisa, enggak bisa barang itu, begitu pun sebaliknya. Jadi harus kolektif kolegial, pleno. Keliru lagi itu media yang berbicara itu. Makanya di dalam penjelasan saya di 33 menit, itu runtut dan semuanya jelas *gitu*. Tapi saya menghargai media ini penting untuk kita tetap dorong sebagai kontrol, kalau tidak, nanti kita kebablasan juga. Tapi apa boleh buat, ini *kan* sudah jadi bubur ayam kita, gara-gara informasi itu *kan*. Tapi saya sering ingatkan sama teman-teman, boleh jabatan, harta diambil, tapi jangan korek harga diri saya, saya kejar sampai lubang batu. Jadi saya minta kita semua ini punya martabat semua, kita punya kehormatan semua, jadi jangan kita menari juga di atas kehormatan teman-teman yang lain. Dan saya harapkan untuk itu sama-sama menjaga, itu mohon maaf, sebagai anak kampung punya prinsip hidup itu dan saya sudah *ngomong* kemarin di teman-teman media.

Saya pikir itu, Pak, sekedar klarifikasi, saya mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk suara saya besar, karena memang saya orang Papua, suaranya besar, sudah biasa teriak di, di kebun-kebun *kan*, di laut-laut, jadi kalau tidak terlalu keras tidak kedengaran begitu. Tapi saya terima kasih

kepada Bapak-bapak semua atas pertanyaan sehingga saya diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Tapi izin, Pak Menteri, dari tadi sering banget *nyebut* “saya Papua, Papua” tapi dalam artian yang tidak terlalu positif, jadi ke depan jangan *gitu dong*, enggak enak kita.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Enggaklah.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Tadi soal bau badanlah apa, saya kira, enggaklah ya, janganlah.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Enggak, karena tadi diangkat “bau amis” soalnya *kan*.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Iya justru itu kan enggak boleh juga dikaitkan sama orang Papua, Pak.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Iya maaf, enggak, saya, maksudnya saya.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Iya, tapi enggak baik, kalau menurut saya.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Anggap saja itu diri saya yang dianggap bau amis.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Ya *gitu* aja jangan bilang, “Karena saya orang Papua” *gitu loh*, seolah-olah kita ini musuh orang Papua nanti, enggak enak.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Enggak, Pak Deddy, enggak, itu saya katakan bahwa saya dari Papua, ya mereka tuduhkan ya saya itu.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Kalau Bapak mau bawa-bawa nama Papua, sebutlah dengan kebanggaan, Pak, maksud saya begitu. Jadi jangan terkesan kita ini orang-orang yang tidak.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Enggak, banyak juga saudara-saudara saya yang baik, Pak Deddy. Tapi maksud saya begini, Pak Deddy, ini media ini juga kita harus kasih pelajaran.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Sepakat saya soal itu.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Jangan juga mereka.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Tapi saya cuma, saya hanya mempersoalkan nama Papua.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Oke.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Dibawa secara tidak pada tempatnya.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Oke, makasih, makasih.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Kita juga menghormati orang Papua.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Maksud saya tidak negatif ya, Pak Deddy, ya, jangan Pak Deddy pikir negatif. Saya penting kenapa saya *ngomong* ini? Karena tadi omongannya itu *udah* kayak kita ini *udah* kayak orang yang betul-betul dihakimi *aja* sama media, aku enggak mau, Pak. Hari ini saya, mungkin besok berpeluang oleh siapa saja. Enggak, ini.

F-PDIP (Prof. Assc. Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A.):

Enggak, ini kan sudah *clear*, Bapak klarifikasi, ini *kan* di dalam ruang sidang ini *kan* pertama kali Bapak *ngomong* ini di sini.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Iya, ya.

Jadi *gitu*, Prof, Jadi sekarang sudah *clear*, sudah mereka minta maaf dan saya juga sudah maafkan, enggak ada masalah. Tapi proses hukumnya tetap berjalan, agar tidak ada dusta di antara kita, demikian, Pak.

Saya untuk mengungkap dugaan itu, ya dugaan itu. Bukan, bukan medianya yang saya proses ya enggak, dugaan yang media tulis itu yang kita proses, agar terang benderang. Kalau enggak, *kan* menjadi fitnah terus. Secara politik, Prof paling ahli politik, saya tidak.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Oke, cukup, cukup saya rasa cukuplah.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Menteri Investasi ya pasti banyak kena itu biasa, Pak.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Enggak.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Pak Bahlil ini kan sekarang jadi menteri yang sangat diidolakan banyak orang dan juga presiden, wajar *aja* banyak yang serang, ya *kan?* *Gitu aja*.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Ya kalau, kalau saya melihatnya begini.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Oke.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Kalau ditanya ini *by design* atau tidak, intuisi saya cukup dalam hati saya, tapi secara firasat politik saya belajar sama Prof, Prof paling pahamlah, terima kasih.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Oke, cukup, kita ada agenda lagi yang sudah telat. Kita langsung ke draf kesimpulan, nanti pada sesi setelah Lebaran di mana kita enggak puasa, boleh kita undang lagi Pak Bahlil *gitu kan*, karena mungkin ada hal-hal yang.

F-PDIP (Prof. Assc. Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A.):

Dengan Kementerian Investasi belum buka.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Pak Darmadi yang enggak puasa, enggak boleh ikut komentar ini.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Pak Bahlil juga harus anggarkan nanti, Pak Ketua, kita bisa melihat tempat-tempat investasi itu, Pak, ya.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Pak, kalau boleh saya usul sebelum ditutup, mungkin habis hari raya, Pak, kita turun *kunjungin* beberapa tempat lokasi hilirisasi, agar bisa juga punya pandangan lebih dekat, seperti sarannya Pak Deddy tadi, sahabat saya. Ya, Pak Deddy, *makasih* banyak.

F-PDIP (Prof. Assc. Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A.):

Iya kami belum pernah.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Oke draf kesimpulan, udah, *udah, udah*, draf kesimpulan.

F-PDIP (Prof. Assc. Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A.):

Wacana terus, betul.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Ini, ini kasihan mitra kita yang nunggu di gedung lain, ini.

Oke, draf kesimpulan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Investasi/BKPM RI terkait Progres Realisasi Investasi tahun 2023, Senin 1 April 2024.

1. Komisi VI DPR RI mengapresiasi capaian Menteri Investasi/BKPM RI dalam realisasi investasi 2023 yang berhasil melampaui angka investasi yang ditargetkan.

Setuju ya? Setuju.

(RAPAT: SETUJU)

2. Komisi VI DPR RI mendorong Kementerian Investasi/BKPM RI agar lebih memprioritaskan investasi yang dapat memberi kemanfaatan besar bagi penciptaan lapangan, lapangan kerja, UMKM dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Ini sesuai amanat pesan teman-teman.
Setuju ya, Pak Menteri?

(RAPAT: SETUJU)

3. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Investasi/BKPM RI untuk menyusun *roadmap* investasi Indonesia.

Sebenarnya sudah ada ini *kan*, Pak Menteri. Sudah ada, sudah *dibiayain*, mungkin perlu di-*updating nih* sesuai arahnya Pak Deddy ini, menteri yang baru ya. Tapi coba ini kalimatnya yang lebih tepat apa, ini *roadmap* sudah ada *kan*, Pak Menteri ini, iya enggak usahlah kalau *gitu* kita, belum meminta *kan*?

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Saya terus-terang belum lihat *roadmap*-nya secara ini, *tapi*, Pak, saya ingin melihat apakah benar-benar itu hanya, seperti tadi, cara berpikirnya lebih pada melihat sumber daya alam *gitu*, Pak, atau yang lainnya *gitu loh*, Pak. Jadi harus ada *blending* yang, yang tepat untuk jangka panjang.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Kalau begitu dikirimkan lagi *deh*, Pak, *copy roadmap*-nya itu.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Nanti kami kirimkan *roadmap* dan kajian hilirisasi di 21 komoditas.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Iya.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Dua puluh satu, 21 komoditas termasuk

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Soalnya kita di TKN udah tahu, Pak, ini *kan* banyak jadi materinya kampanye kita kemarin. Ini teman-teman di kubu lain perlu di,

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Ini mau *ngajak-ngajak* balik-balik *nih*.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Jadi nomor tiga dihapus saja, langsung jadi.

3. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Investasi/BKPM, pakai BKPM RI *dong*, untuk lebih rinci dalam menyampaikan data investasi terkait sektor dan distribusi investasi di Jawa dan luar Jawa.

Tadi ada yang minta distribusi wilayah ya, *oke*.

(RAPAT: SETUJU)

4. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Investasi/BKPM RI untuk memberikan, oh *udah* tadi, oh memberikan data yang jelas dan detail terkait investasi dan investor di IKN.

Eenggak, beda, ini data-data IKN ini khusus IKN, ada eenggak, Pak, Menteri ini? Ya secara tertulis ini, ada ya, nanti bisa disampaikan?

(RAPAT: SETUJU)

Baik.

F-PD (Dr. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Sekalian, sekalian, tadi masalah data. Saya *kan* juga meminta data tadi untuk daftar investasi yang terakumulasi menjadi 1.400 triliun itu apa saja, *gitu?*

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Boleh, tadi nomor berapa itu *kan*.

F-PD (Dr. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Eenggak ada, itu *kan* IKN, kalau itu *kan* IKN.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Eenggak, yang sebelumnya, apa *sih*.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Pak, menyangkut Pak Khaeron, kalau boleh, Pak, saya kalau boleh menyarankan, kita bikin per klasifikasi, Pak, ya, sektor hilirisasi apa, terus infrastrukturnya berapa, sektor perkebunannya, begitu, ya. Tidak semua perusahaan di *breakdown* begitu *kan*, itu *kan* ratusan mungkin ribuan kali, jadi kita bikin per, per kelompok,

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Yang signifikan *aja*, Pak,

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Iya, iya, setuju.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Kalau dia cuma investasi 100 miliar mungkin enggak terlalu penting, Pak.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Ya, ya, ya, kita, habis itu kita uji petik, Pak. Saran saya, setelah itu, ini kita uji petik.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Itu kira-kira yang diminta di poin sebelumnya IKN tadi ya, *oke*.

Nah, nomor lima ini terkait yang kontroversial tersebut.

5. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Investasi/BKPM RI,

F-PD (Dr. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Pak Haikal.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Kenapa?

F-PD (Dr. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Saya kira di poin yang empat itu, selain minta data yang IKN, dan data investasi, terserah nanti dalam klaster atau,

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Itu di nomor tiga ada, coba nomor tiga, meminta Kementerian Investasi untuk lebih rinci dalam menyampaikan data investasi terkait sektor distribusi, dan lain-lain.

Oke lanjut ke nomor tadi berapa jadinya, nomor lima, eh nomor ya nomor lima.

5. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Investasi/BKPM RI untuk menyampaikan laporan detail terkait kinerja Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi.

Yang tadi Bapak sampaikan, tapi belum ada bahannya di kita, Pak.

(RAPAT: SETUJU)

Baik.

6. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Investasi/BKPM RI untuk turut aktif dalam mencegah dan memberantas praktik-praktik mafia di sektor pertambangan.

Ini himbauan, saya rasa teman-teman setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Oke.

Dan nomor tujuh, terakhir.

F-PDIP (Dr. Ir. HARRIS TURINO, S.H., M.Si., M.M.):

Izin, Pimpinan, izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Ya.

F-PDIP (Dr. Ir. HARRIS TURINO, S.H., M.Si., M.M.):

Saya masih tetap mengusulkan untuk dibentuk Panja investasi.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Baik, itu nanti rapat internal, Pak.

F-PDIP (Dr. Ir. HARRIS TURINO, S.H., M.Si., M.M.):

Di?

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Di rapat internal, bukan di keputusan raker.

F-PDIP (Dr. Ir. HARRIS TURINO, S.H., M.Si., M.M.):

Oh iya, *makasih*.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

7. Komisi VI DPR RI memberikan waktu untuk Kementerian Investasi dan BKPM RI untuk memberikan jawaban tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja atas pertanyaan anggota Komisi VI DPR RI.

(RAPAT: SETUJU)

Baik, terima kasih.

Saya rasa ini kita sudah *overtime*-nya agak panjang, kami tutup.

Atas nama Pimpinan Komisi VI, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Komisi VI dan Bapak Bahlil selaku Menteri Investasi dan Kepala BKPM RI beserta seluruh jajarannya atas raker kita pada hari ini, semoga puasa kita masih bertahan ya sampai sore ini.

Terima kasih, rapat saya tutup.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.25 WIB)

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

TTD.

DEWI RESMINI, S.E., M.Si.
NIP. 197104071992032001